EFEKTIVITAS SEKOLAH DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK (Studi di KPU Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh:

Kevin Nurayendra
NIM: 224102030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

EFEKTIVITAS SEKOLAH DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK (Studi di KPU Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Kevin Nurayendra
NIM: 224102030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

EFEKTIVITAS SEKOLAH DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK (Studi di KPU Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Kevin Nurayendra
NIM: 224102030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S. Ag, S.H, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

EFEKTIVITAS SEKOLAH DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK (Studi di KPU Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari Selasa
Tanggal: 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Sholikul Hadi, S.H., M.H.	**H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M. H.**
NIP. 197507012009011009	**NIP. 198208222009101002**

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ( )
2. Prof. Dr. HM. Noor Harisudin. S.Ag., S.H., M. Fil.I. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran paling baik. kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempiurnaan 2019* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), Surah An-Nisa ayat 58.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Warto dan Ibu Mulyani. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa, serta dukungan yang tak pernah putus untuk saya. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar perjuangan dan ketulusan Bapak dan Ibu dalam mendidik, membesarkan, dan menguatkan saya hingga berada pada titik ini. Setiap tetes keringat, setiap doa yang dipanjatkan, serta setiap nasihat yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan wujud sederhana dari rasa terima kasih dan bakti penulis atas segala perjuangan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak saya, Salsa Zannuba Arifah Khabsoh, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada saya. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dorongan ketika saya merasa lelah, serta selalu mengingatkan saya untuk tetap kuat menghadapi segala proses yang tidak mudah ini. Kehadiran dan dukunganmu menjadi salah satu semangat saya untuk terus maju dan tidak menyerah.
3. Patner saya Amelian Lutfiyah, terima kasih telah menjadi sosok yang senantiasa hadir dengan doa, dukungan, perhatian, serta kesabaran dalam setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

proses yang telah kulalui. Terima kasih karena telah menemani setiap langkah, menjadi tempat berbagi cerita, dan selalu memberikan semangat ketika rasa lelah datang. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi keberkahan, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita serta kebahagiaan di masa yang akan datang.

4. Teman saya, Avid, Iklam, Fatah, Duta, dan Rizaldi, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta semangat yang telah diberikan selama perjalanan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga pertemanan ini tetap terjaga, dan semoga kita semua diberikan kesuksesan serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"*Efektivitas Sekolah Demokrasi Bagi Pemilih Pemula dalam Meningkatkan Kesadaran Politik (Studi Di KPU Kabupaten Jember)*"** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Rektor PLT UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berperan sebagai pimpinan tertinggi universitas dalam menetapkan kebijakan, mengembangkan mutu pendidikan, serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 yang telah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan terbaik bagi penulis.

6. Bapak Aenur Rosyid, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, serta kelancaran prosedur mulai semester awal hingga akhir kelulusan.
7. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S. Ag, S.H, M.Fil.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan hingga skripsi ini bisa tersusun dengan baik.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta kemudahan dalam proses administrasi selama penyusunan skripsi ini.
9. Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Jember yang telah memberikan izin, bantuan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ini di masa yang akan datang. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan bagi pembaca. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca dan generasi selanjutnya.

Jember, 30 Juni 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Kevin Nurayendra, 2026: *Efektivitas Sekolah Demokrasi Bagi Pemilih Pemula dalam Meningkatkan Kesadaran Politik (Studi Di KPU Kabupaten Jember)*.

Kata Kunci: Efektivitas, Sekolah Demokrasi, Kesadaran Politik, Pemilih Pemula, Fikih Siyasah Dusturiyah.

Kesadaran politik pemilih pemula memiliki peranan penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Namun, masih rendahnya pemahaman politik, sikap apatis terhadap pemilu, serta minimnya partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Dalam upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menyelenggarakan Program Sekolah Demokrasi sebagai bentuk pendidikan politik nonformal bagi generasi muda.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi oleh KPU Kabupaten Jember; 2) bagaimana efektivitas Program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember; dan 3) bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap Program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi oleh KPU Kabupaten Jember; 2) untuk menganalisis efektivitas Program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember; dan 3) untuk menganalisis perspektif fikih siyasah terhadap Program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh simpulan bahwa: 1) Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan seperti keterbatasan narasumber, keterbatasan anggaran, suasana kegiatan yang kurang interaktif, cakupan peserta yang terbatas, serta frekuensi pelaksanaan yang belum memadai; 2) program ini cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula pada aspek kognitif, afektif, dan kepedulian politik, meskipun efektivitasnya belum merata karena hanya dirasakan oleh peserta yang aktif berorganisasi; dan 3) dalam perspektif fikih siyasah, program ini sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umat.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA **22**

A. Penelitian Terdahulu 22

B. Kajian Teori 29

1. Teori Implementasi Kebijakan 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori Efektivitas Hukum 36
3. Teori Kesadaran Politik 41
4. Teori Demokrasi 46
5. Konsep Fikih Siyasah Dusturiyah 50

BAB III METODE PENELITIAN 56

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 56
B. Lokasi Penelitian 57
C. Subyek Penelitian 58
D. Teknik Pengumpulan Data 59
E. Analisis Data 61
F. Keabsahan Data 64
G. Tahap-Tahap Penelitian 65

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 67

A. Gambaran Objek Penelitian 67
B. Penyajian Data dan Analisis 76
C. Pembahasan Temuan 1297

BAB V PENUTUP 150

A. Simpulan 150
B. Saran 153

DAFTAR PUSTAKA 156

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Komposisi Pemilih Berdasarkan Generasi pada Pemilu 2024 3

1.2 Data Penggunaan Hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024 4

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 27

4.1 Temuan Hasil Penelitian 125

4.2 Perbandingan Pra dan Pasca Sekolah Demokrasi 134

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi 74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, serta Pasal 22E ayat (1) yang menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.[1] Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 448 ayat (1).[2] Selain itu, Pasal 449 menyebutkan bahwa pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1)

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 ayat (1).

mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu.[3] Dengan demikian, pendidikan politik memiliki peran yang strategis sebagai instrumen dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, khususnya di kalangan pemilih pemula.

Selain Undang-Undang tersebut, pengaturan teknis mengenai partisipasi masyarakat juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.[4] Selanjutnya, Pasal 10 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.[5] Kemudian, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam pemilu.[6] Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program pendidikan politik seperti Sekolah Demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, komposisi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 didominasi oleh kelompok generasi muda. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z dan Generasi Milenial memiliki peran yang sangat strategis dalam

[3] Setneg RI, UU No. 7 Tahun 2017, pasal 449.
[4] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 2.
[5] PKPU No. 9 Tahun 2022, Pasal 10.
[6] PKPU No. 9 Tahun 2022, Pasal 3.

menentukan arah demokrasi di Indonesia. Besarnya jumlah pemilih dari kedua generasi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi KPU untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik yang efektif guna meningkatkan kesadaran politik serta partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Adapun komposisi pemilih berdasarkan kelompok generasi pada Pemilu Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1
Komposisi Pemilih Berdasarkan Generasi pada Pemilu 2024

Kelompok Generasi	Jumlah Pemilih	Persentase
Generasi Z (Usia 15-27 Tahun)	50.645.669	24,94%
Generasi Milenial (Usia 28-43Tahun)	67.909.820	33,44%
Generasi X (Usia 44-59 Tahun)	54.917.385	27,05%
Baby Boomer (Usia 60-78 Tahun)	26.557.170	13,08%
Pre- Boomer (Usia 79 Tahun Keatas)	3.026.704	1,49%
Total	**204.807.222**	**100%**

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jumlah pemilih pada Pemilu Tahun 2024 didominasi oleh generasi muda. Generasi Milenial merupakan kelompok pemilih terbesar dengan jumlah 67.909.820 orang atau 33,44% dari total pemilih, diikuti oleh Generasi Z sebanyak 50.645.669 orang atau 24,94%. Dengan demikian, apabila digabungkan, Generasi Z dan Generasi Milenial mencapai 118.555.489 pemilih atau 58,38% dari keseluruhan pemilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari generasi muda, sehingga kelompok ini memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi politik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendidikan politik, dan kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.[7]

Selain mengetahui komposisi pemilih berdasarkan kelompok generasi, penting pula untuk melihat tingkat penggunaan hak pilih masyarakat pada Pemilu Tahun 2024. Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu sekaligus menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Informasi tersebut menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas upaya sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU. Data mengenai penggunaan hak pilih masyarakat pada Pemilu Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.2
Data Penggunaan Hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024

Keterangan	Jumlah
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	204.807.222
Menggunakan Hak Pilih	165.150.920
Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput)	39.656.302
Persentae Golput	24,07%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun Pemilu Tahun 2024 didominasi oleh pemilih dari generasi muda, tingkat partisipasi masyarakat masih belum mencapai angka maksimal. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terdapat 39.656.302 pemilih atau sekitar 24,07% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seperempat dari total pemilih tidak berpartisipasi dalam proses pemungutan suara. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi

[7] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Lembar Fakta KPU Edisi 1 Tahun 2024* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Tahun, 2024).

penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi, pendidikan politik, dan penyebarluasan informasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Tingginya angka golput juga menjadi indikator bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun sosial-politik.[8]

Upaya peningkatan kesadaran politik oleh KPU Kabupaten Jember tidak hanya dilakukan melalui Program Sekolah Demokrasi, tetapi juga melalui berbagai kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan. Salah satunya adalah kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan di UIN KHAS Jember. Dalam kegiatan tersebut disampaikan pentingnya membangun kesadaran pemilih agar mampu menggunakan hak pilih secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik bagi generasi muda merupakan salah satu fokus utama KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara teoritis, partisipasi politik dapat dimaknai sebagai keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas politik. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan individu maupun kelompok dalam kehidupan politik yang dilakukan secara aktif, seperti ikut memilih

[8] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden 2024* (Jakarta: KPU RI, 2024).

[9] Jatim NU Online, "Prof. Haris Tekankan Pentingnya Kesadaran Pemilih Saat Sosialisasi di UIN KHAS Jember," diakses 2 Juli 2026, https://jatim.nu.or.id/pendidikan/prof-haris-tekankan-pentingnya-kesadaran-pemilih-saat-sosialisasi-di-uin-khas-jember-Oi7dy

pemimpin serta memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah.[10] Sementara itu, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.[11] Dengan demikian, kesadaran politik menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, serta keterlibatannya dalam kehidupan politik.

Dalam perspektif fikih siyasah, partisipasi masyarakat dalam urusan kenegaraan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah SWT.:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنُهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: ”juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”[12] (QS. Asy-Syura: 38)

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan melalui musyawarah. Dalam konteks negara modern, partisipasi politik melalui pemilu merupakan bentuk implementasi prinsip musyawarah tersebut. Oleh karena itu, pemilih pemula perlu dibekali pendidikan politik agar mampu berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

---

[10] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 367.

[11] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1976), 3.

[12] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempiurnaan 2019*, Surah Asy-Syura ayat 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."[13] (HR. Al-Bukhari, 893, Muslim, 1829)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap pemegang amanah, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, memiliki tanggung jawab untuk membimbing masyarakat agar memahami hak dan kewajiban politiknya. Program Sekolah Demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU merupakan wujud tanggung jawab tersebut dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula.

Dalam kaidah fikih siyasah juga ditegaskan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."[14]

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan lembaga negara harus diarahkan pada kemanfaatan masyarakat. Program Sekolah Demokrasi merupakan bentuk kebijakan pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas.

Dalam perspektif fikih siyasah, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 708.

[14] Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10, No. 2 (2021): 130, https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278

ialah memberikan pemahaman politik kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran serta partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Fikih siyasah sendiri merupakan kajian dalam hukum Islam yang membahas tata kelola kehidupan bernegara dan hubungan masyarakat dengan kekuasaan demi tercapainya kemaslahatan bersama.[15] Oleh karena itu, program pendidikan politik seperti Sekolah Demokrasi dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara dalam membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, supaya mampu berpartisipasi secara aktif, sadar, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, dalam kajian siyasah dusturiyah, hubungan antara pemerintah dan masyarakat didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.[16] Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember dapat dipandang sebagai implementasi tanggung jawab lembaga negara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat demi terciptanya demokrasi yang berkualitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula, tetapi juga meninjau program tersebut dalam perspektif fikih siyasah sebagai bentuk kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

[16] J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 27.

Di tingkat daerah, fenomena dominasi pemilih muda juga terlihat di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya dan Kabupaten Jember. Kota Surabaya memiliki jumlah DPT sebesar 2.218.586 pemilih, dengan sekitar 30% merupakan pemilih pemula.[17] Sementara itu, Kabupaten Jember memiliki jumlah DPT sebesar 1.972.216 pemilih, dengan estimasi pemilih pemula sekitar 20-25% dari total pemilih.[18] Jumlah ini menempatkan Kabupaten Jember sebagai daerah dengan pemilih pemula terbanyak kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilih pemula di Kabupaten Jember memiliki potensi besar dalam membentuk kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Namun demikian, besarnya jumlah pemilih pemula tidak selalu diikuti dengan tingginya tingkat kesadaran politik. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya serta rendahnya pemahaman terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah melalui program pendidikan politik seperti Sekolah Demokrasi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengenai pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya pada. Dengan adanya program ini, diharapkan terjadi adanya peningkatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Data DPT Pemilu 2024, 2023. https://kota-surabaya.kpu.go.id/blog/read/daftar-pemilih-tetap-dpt-kota-surabaya-pemilu-tahun-2024

[18] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Data DPT Pemilu 2024, 2023. https://kab-jember.kpu.go.id/blog/read/kpu-jember-tetapkan-daftar-pemilih-tetap-dpt

kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya demokrasi dan penggunaan hak politik secara bertanggung jawab.

Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 dengan mengusung tema "Membangun Kesadaran Demokrasi Generasi Muda". Kegiatan tersebut berlangsung di kantor KPU Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 64A, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Program ini ditujukan sebagai sarana pendidikan politik bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula, agar memiliki pemahaman dan kesadaran politik dalam kehidupan demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dominasi pemilih pemula dalam struktur pemilih menuntut adanya upaya peningkatan kesadaran politik yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas Sekolah Demokrasi bagi pemilih pemula dalam meningkatkan kesadaran politik, khususnya di Kabupaten Jember, menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember?

3. Bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politk pemilih pemula di Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui perspektif fikih siyasah terhadap program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pelaksanaan pendidikan politik, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas program Sekolah Demokrasi bagi pemilih pemula dalam meningkatkan kesadaran politik. Secara umum, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik dan hukum tata negara yang berkaitan dengan

kesadaran politik masyarakat.[19] Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara pendidikan politik dan tingkat kesadaran politik pemilih pemula.

Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.[20]

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang pendidikan politik, kesadaran politik, dan penguatan demokrasi, khususnya di tingkat lokal seperti Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai efektivitas program pendidikan politik, khususnya Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] M. Noor Harisudin, dkk., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2024), 10.

[20] Munandar, dkk., ”Pendidikan Politik Pemilih Pemula Melalui Politik Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10, No. 2 (2026): 112-115, https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36126

peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian lapangan.[21]

b. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU, khususnya KPU Kabupaten Jember, dalam meningkatkan kualitas program Sekolah Demokrasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki metode, materi, dan strategi pelaksanaan pendidikan pemilih agar lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.[22]

c. Bagi Masyarakat (Pemilih Pemula)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama pemilih pemula, terkait pentingnya kesadaran politik dalam kehidupan demokrasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemilih pemula dapat meningkatkan partisipasi politiknya secara aktif dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan demokrasi.[23]

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam mengembangkan kajian mengenai pendidikan politik, kesadaran politik, serta demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Alfarisyi, dkk., "Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Pendidikan Demokrasi", Civilia: *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, No. 1 (2023): 20-25, https://doi.org/10.572349/civilia.v1i1.329

[22] Wulandari, dkk., "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula", *Jurnal Comserva* 4, No. 4 (2024): 67-70, https://doi.org/10.59141/comserva.v4i4.1545

[23] Ainurrizqi & Sukmana, "Partisipasi Politik Masyarakat di Negara Demokrasi", *Journal of Society Bridge* 3, No. 2 (2025): 10-13, https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.74

Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih akademik terhadap pengembangan keilmuan di bidang hukum tata negara dan ilmu politik di Indonesia.[24]

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjelas makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran isi penelitian. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

   Efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelaksanaan serta kesesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai.[25] Dalam konteks penelitian ini, efektivitas merujuk pada kemampuan program Sekolah Demokrasi dalam mencapai tujuan peningkatan kesadaran politik pemilih pemula.

2. Sekolah Demokrasi

   Sekolah Demokrasi merupakan program pendidikan politik dan pendidikan demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[24] Novandika & Riyanti, "Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda", *Jurnal Themis* 2, No. 1 (2024): 40-43, https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.851

[25] Harisudin, dkk., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, 52-54.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan edukatif seperti pelatihan, diskusi, sosialisasi, simulasi pemilu, dan pembelajaran partisipatif yang ditujukan khususnya kepada pemilih pemula agar mampu menjadi warga negara yang sadar politik, kritis, dan partisipatif dalam kehidupan demokrasi.

Pendidikan demokrasi pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membentuk masyarakat yang memahami nilai-nilai demokrasi dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial maupun politik. Menurut Zamroni, pendidikan demokrasi merupakan proses pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki kesadaran demokrasi, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis.[26] Pendidikan demokrasi juga diarahkan untuk membangun budaya demokrasi dalam masyarakat melalui penguatan sikap toleransi, tanggung jawab, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak politik warga negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, pendidikan demokrasi memiliki hubungan erat dengan pendidikan politik karena keduanya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehidupan politik dan demokrasi. Menurut Ramlan Surbakti, kesadaran politik merupakan kesadaran seseorang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai sistem politik serta partisipasi dalam kehidupan

[26] Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural* (Jakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), 15.

demokrasi.[27] Oleh karena itu, Sekolah Demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai pemilu, tetapi juga sebagai media pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula.

Program Sekolah Demokrasi juga merupakan bentuk pendidikan politik nonformal yang bertujuan menciptakan masyarakat yang demokratis dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Zamroni yang menyatakan bahwa pendidikan demokrasi harus mampu mendorong masyarakat untuk aktif dalam kehidupan publik dan memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan demokrasi.

Dalam konteks penelitian ini, Sekolah Demokrasi dipahami sebagai program pendidikan politik nonformal yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula melalui pendidikan demokrasi, pendidikan kepemiluan, serta penguatan partisipasi politik masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga negara yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Secara umum, istilah ini merujuk pada individu yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yakni berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tetapi belum pernah berpartisipasi dalam pemilu sebelumnya.[28] Dalam penelitian ini, pemilih pemula merujuk pada generasi muda yang menjadi peserta

[27] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), 144.
[28] Setneg RI, UU No 7 Tahun 2017, pasal 448.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Sekolah Demokrasi dan memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi di masa depan, serta menjadi kelompok strategis dalam pembangunan budaya demokrasi.

4. Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan tingkat pemahaman individu terhadap sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan dalam kehidupan politik. Kesadaran politik mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan persepsi terhadap proses demokrasi.[29]

Dalam penelitian ini, kesadaran politik diukur dari sejauh mana pemilih pemula memahami pentingnya pemilu, hak pilih, serta pemahaman terhadap pentingnya keterlibatan yang bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

5. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat terhadap sistem politik, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.[30] Pendidikan politik dapat dilakukan secara formal maupun nonformal, termasuk melalui program-program yang diselenggarakan oleh lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini, pendidikan politik merujuk pada kegiatan edukatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[29] Alfarisyi, dkk., ”Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”, 5.
[30] Wulandari, dkk., ”Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula”, 916.

yang diberikan melalui program Sekolah Demokrasi untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula.

6. Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas mengenai pengaturan kehidupan bernegara, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut Muhammad Iqbal, fikih siyasah adalah pengelolaan urusan kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudaratan sesuai dengan nilai-nilai Islam.[31] Dalam konteks negara modern, fikih siyasah tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga mencakup kebijakan pendidikan, sosial, dan politik yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, J. Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa siyasah dusturiyah dalam Islam menekankan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat.[32] Oleh karena itu, program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam penelitian ini, fikih siyasah digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis

[31] Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, 4-5.
[32] Pulungan, *Fikih Siyasah*, 25-27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian mengenai alur pembahasan dalam penelitian skripsi yang disusun secara sistematis mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

   Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang memuat gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini dibahas mengenai konteks penelitian yang menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian tentang efektivitas program Sekolah Demokrasi bagi pemilih pemula dalam meningkatkan kesadaran politik di Kabupaten Jember. Selain itu, bab ini memuat fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

2. BAB II Kajian Pustaka

   Bab ini berisi kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, guna mengetahui posisi dan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat kajian teori yang digunakan sebagai landasan analisis, meliputi teori implementasi kebijakan, teori efektivitas hukum, teori kesadaran politik, teori demokrai,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

serta konsep fikih siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan efektivitas program Sekolah Demokrasi.

3. BAB III Metode Penelitian

   Bab ini memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian. Pada bagian ini dijelaskan bahwa penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (f*ield research*) untuk memperoleh data terkait efektivitas Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember.

4. BAB IV Penyajian Data dan Analisis

   Bab ini berisi penyajian data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan program Sekolah Demokrasi di KPU Kabupaten Jember. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka untuk mengetahui efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Dalam bab ini juga dibahas tinjauan fikih siyasah terhadap program Sekolah Demokrasi sebagai bentuk pendidikan politik bagi pemilih pemula.

5. BAB V Penutup

   Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai efektivitas program Sekolah Demokrasi bagi pemilih pemula dalam meningkatkan kesadaran politik di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kabupaten Jember. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program pendidikan politik ke depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, kemudian disusun dalam bentuk ringkasan untuk melihat relevansi dan perbedaannya. Penelitian terdahulu tersebut dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, maupun artikel ilmiah, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Melalui kajian penelitian terdahulu ini, penulis dapat mengetahui tingkat orisinalitas serta posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.[34]

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tia Puji Astutik (2025) berjudul *"Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024."* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember terhadap pemilih pemula dalam menghadapi Pilkada Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan KPU

[34] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Uin Khas Jember: Jember, 2025), 47.

Kabupaten Jember mampu meningkatkan pemahaman pemilih pemula mengenai demokrasi dan penggunaan hak pilih dalam pemilu.[35]

Persamaan penelitian Tia Puji Astutik dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai efektivitas pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jember. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula dalam kehidupan demokrasi.

Perbedaannya terletak pada objek program dan fokus penelitian. Penelitian Tia Puji Astutik berfokus pada efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih pemula dalam menghadapi Pilkada Tahun 2024, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan perspektif fikih siyasah sebagai pisau analisis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hayyumi Adi Putra (2021) berjudul *Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018."* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik

[35] Tia Puji Astutik, ”Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember melakukan berbagai strategi pendidikan politik dan sosialisasi pemilu kepada masyarakat melalui media sosial, sosialisasi langsung, serta program pendidikan pemilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilu dalam kehidupan demokrasi.[36]

Persamaan penelitian Hayyumi Adi Putra dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pendidikan politik dan upaya KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan pemilu. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan meneliti program yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jember.

Perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian Hayyumi Adi Putra berfokus pada strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan perspektif fikih siyasah sebagai pisau analisis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Valentino Tabang dkk. (2025) berjudul *"Pendidikan Demokrasi di Sekolah Sebagai Sarana Meningkatkan*

[36] Hayyumi Adi Putra, "Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kesadaran Politik Pemilih Pemula Kelas XII di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan demokrasi dalam membentuk kesadaran politik pemilih pemula. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi melalui seminar, diskusi, dan program KPU Goes to School mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik siswa, meskipun keterlibatan politik siswa masih rendah.[37]

Persamaan penelitian Valentino Tabang dkk. dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pendidikan demokrasi dan kesadaran politik pemilih pemula. Kedua penelitian sama-sama mengkaji bagaimana program pendidikan politik dapat membentuk pemahaman dan kesadaran politik generasi muda dalam kehidupan demokrasi.

Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian Valentino Tabang dkk. berfokus pada pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah melalui kegiatan pembelajaran dan program KPU Goes to School di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember dengan perspektif fikih siyasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Valentino Tabang, dkk., "Pendidikan Demokrasi di Sekolah Sebagai Sarana Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Kelas XII di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 8*, No. 6 (2025): 6164, https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8166

4. Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati Sianturi dkk. (2026) berjudul *"Peran Edukasi Politik Bawaslu dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula di Kota Medan."* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran edukasi politik dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi politik yang dilakukan secara interaktif mampu meningkatkan pemahaman, sikap kritis, dan kesadaran demokrasi pemilih pemula.[38]

   Persamaan penelitian Risnawati Sianturi dkk. dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai edukasi politik dan peningkatan kesadaran politik pemilih pemula. Kedua penelitian sama-sama membahas pentingnya pendidikan politik dalam membentuk pemilih muda yang sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

   Perbedaannya terletak pada lembaga pelaksana dan fokus program yang diteliti. Penelitian Risnawati Sianturi dkk. membahas peran edukasi politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Medan, sedangkan penelitian penulis membahas efektivitas program Sekolah Demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian penulis juga menambahkan perspektif fikih siyasah sebagai pisau analisis.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Tiyo Warman dkk. (2024) berjudul *"Peran Pendidikan Politik dan Demokrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula pada Pemilu di SMP Swasta Budi Agung*

[38] Risnawati Sianturi, "Peran Edukasi Politik Bawaslu dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula di Kota Medan", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1,* No. 2 (2026), 1-2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Medan." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran pemilih pemula. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh terhadap pemahaman demokrasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya hak pilih.[39]

Persamaan penelitian Ade Tiyo Warman, dkk. dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai pendidikan politik, demokrasi, dan kesadaran politik pemilih pemula. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan pemahaman demokrasi generasi muda.

Perbedaannya terletak pada subjek dan bentuk pendidikan politik yang diteliti. Penelitian Ade Tiyo Warman dkk. berfokus pada siswa sekolah menengah pertama melalui pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemilih pemula yang mengikuti program Sekolah Demokrasi oleh KPU Kabupaten Jember. Penelitian penulis juga mengkaji program tersebut dari perspektif fikih siyasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Ade Tiyo Warman, dkk., " Peran Pendidikan Politik dan Demokrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula pada Pemilu di SMP Swasta Budi Agung Medan", *Jurnal Pendidikan Tambusai 8*, No. 3 (2024), 41670.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Penulis, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tia Puji Astutik, (2025)	”Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”	Sama-sama membahas pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jember. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas upaya peningkatan pemahaman serta kesadaran politik pemilih pemula.	Penelitian Tia Puji Astutik berfokus pada efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih dalam menghadapi Pilkada 2024, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Penelitian penulis juga menggunakan perspektif fikih siyasah.
2.	Hayyumi Adi Putra, (2018)	”Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”	Sama-sama membahas peran dan program KPU Kabupaten Jember dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian Hayyumi Adi Putra berfokus pada strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum pada Pilgub Jawa Timur Tahun 2018, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas program Sekolah Demokrasi bagi pemilih pemula dalam meningkatkan kesadaran politik.
3.	Valentino Tabang, dkk., (2025)	”Pendidikan Demokrasi di Sekolah Sebagai Sarana Meningkatkan Kesadaran	Sama-sama membahas pendidikan demokrasi dan kesadaran politik pemilih pemula	Penelitian Valentino Tabang dkk. berfokus pada pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah melalui pembelajaran

		Politik Pemilih Pemula Kelas XII di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya"	dalam kehidupan demokrasi. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	dan kegiatan sekolah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember.
4.	Risnawati Sianturi, dkk., (2026)	"Peran Edukasi Politik Bawaslu dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula di Kota Medan"	Sama-sama membahas pendidikan politik dan peningkatan kesadaran politik pemilih pemula melalui program edukasi demokrasi.	Penelitian Risnawati Sianturi dkk. berfokus pada edukasi politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Medan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas program Sekolah Demokrasi oleh KPU Kabupaten Jember serta dianalisis menggunakan perspektif fikih siyasah.
5.	Ade Tiyo Warman dkk. (2024)	"Peran Pendidikan Politik dan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu di SMP Swasta Budi Agung Medan"	Sama-sama membahas pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula serta pentingnya pemahaman politik dalam kehidupan demokrasi.	Penelitian Ade Tiyo Warman dkk. lebih berfokus pada pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dan kaitannya dengan partisipasi pemilih pemula, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai landasan konseptual sekaligus perspektif analisis dalam memahami fenomena yang

diteliti. Teori tidak digunakan untuk diuji, melainkan sebagai alat bantu untuk menginterpretasikan data serta menjelaskan makna di balik fenomena sosial yang terjadi. Oleh karena itu, pemilihan teori yang relevan sangat penting agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Dalam penelitian ini, kajian teori difokuskan pada beberapa konsep utama, yaitu implementasi kebijakan, efektivitas, kesadaran politik, fikih siyasah dusturiyah.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Makna implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan setelah ditetapkan secara resmi. Implementasi kebijakan berfokus pada berbagai kegiatan dan tindakan yang dilakukan setelah pedoman kebijakan diberlakukan, baik dalam bentuk pengelolaan administrasi maupun dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Kusumanegara menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu output yang berkaitan dengan aktivitas dalam mencapai tujuan program. Implementasi dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan program dengan arahan yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun adanya penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.

Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III merupakan teori yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan atau program sangat dipengaruhi oleh proses implementasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan publik karena sebaik apa pun suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebijakan dibuat, kebijakan tersebut tidak akan mencapai tujuan apabila pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. George C. Edward III menyatakan bahwa terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur organisasi (*organization structure*).[40]

a. Komunikasi

Implementasi suatu program melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut memiliki peran yang berbeda, di mana pemerintah bertindak sebagai pihak yang merancang dan menetapkan program, swasta sebagai penyedia layanan atau pendukung pelaksanaan program, sedangkan masyarakat menjadi sasaran sekaligus penerima manfaat dari program tersebut. Oleh karena itu, informasi mengenai kepentingan serta manfaat yang diperoleh masing-masing pihak perlu disampaikan secara terbuka, transparan, dan akuntabel agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

Sebagai contoh, dalam program pengembangan ekonomi digital di lingkungan masyarakat pedesaan, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan internet untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Pemerintah menawarkan kerja sama dan dukungan fasilitas kepada penyedia layanan internet, sementara

[40] Ibrahim Kristofol Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024), 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat diberikan pemahaman mengenai manfaat ekonomi digital dalam meningkatkan kesejahteraan. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi, pihak swasta memperoleh keuntungan dari penyediaan layanan, dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses informasi serta meningkatkan potensi ekonomi keluarga dan hasil produksi masyarakat secara lebih luas. Dalam penelitian ini, komunikasi dapat dilihat dari bagaimana KPU Kabupaten Jember menyampaikan informasi mengenai program Sekolah Demokrasi kepada pemilih pemula, baik melalui sosialisasi, media sosial, sekolah, maupun kegiatan pendidikan politik lainnya.

b. Sumber Daya

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan telah disampaikan secara transparan dan akuntabel, tetapi tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, maka pelaksanaan kebijakan tersebut sulit berjalan secara efektif. Sumber daya yang dimaksud meliputi kualitas sumber daya manusia serta dukungan finansial yang cukup. Tanpa adanya dukungan tersebut, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa pelaksanaan yang optimal. Bahkan, meskipun sumber daya finansial tersedia, apabila tidak dimanfaatkan secara tepat, maka tujuan dan target kebijakan yang telah ditetapkan juga sulit tercapai sesuai dengan waktu yang direncanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teoritis, tetapi juga kemampuan praktis dalam pelaksanaan di lapangan. Kemampuan teoritis diperlukan untuk memahami konsep, kondisi geografis, serta karakteristik kelompok sasaran kebijakan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting karena berkaitan dengan kemudahan akses masyarakat terhadap program atau kebijakan yang dilaksanakan.

Dalam konteks penelitian ini, sumber daya dapat dilihat dari kesiapan KPU Kabupaten Jember dalam menyediakan pemateri, fasilitas kegiatan, media pembelajaran, serta anggaran untuk menjalankan program Sekolah Demokrasi.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Pengetahuan akademik maupun kemampuan teoritis dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam bentuk program dan kegiatan belum cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor psikologis implementor juga menjadi aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, komitmen implementor dapat diukur melalui rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, implementor dituntut untuk memegang teguh sumpah dan janji dalam menjalankan tugas serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tanggung jawabnya kepada negara. Adapun sebagai abdi masyarakat, implementor berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya secara optimal.

Dalam penelitian ini, disposisi dapat dianalisis melalui kesungguhan dan komitmen pihak KPU Kabupaten Jember dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula melalui program Sekolah Demokrasi.

d. Struktur Organisasi

Organisasi yang melaksanakan kebijakan publik memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, kesesuaian antara jenis program dengan implementor yang memiliki kompetensi juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antar pelaksana sangat diperlukan agar program dapat berjalan secara efektif. Apabila terdapat program atau kegiatan yang serupa dan dilaksanakan oleh instansi yang berbeda, maka diperlukan kejelasan mengenai tugas, fungsi, serta spesifikasi masing-masing program secara tepat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih maupun ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik*, 8.

Dalam penelitian ini, struktur organisasi dapat dilihat dari pembagian tugas antar divisi di KPU Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan program Sekolah Demokrasi.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan tidak akan mencapai tujuan apabila tidak dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan tahapan implementasi kebijakan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Tahapan implementasi dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

a. Bersifat *self-executing*, merupakan kebijakan yang dapat berjalan atau berlaku dengan sendirinya setelah dirumuskan dan disahkan, tanpa memerlukan tindakan lanjutan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Contohnya ialah pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
b. Bersifat *non self-executing*, merupakan kebijakan yang pelaksanaannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dengan demikian, kebijakan tersebut membutuhkan proses implementasi, koordinasi, serta dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember termasuk kebijakan yang bersifat *non self-executing* karena pelaksanaannya memerlukan keterlibatan penyelenggara, peserta, materi pendidikan politik, fasilitas, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

proses sosialisasi agar tujuan peningkatan kesadaran politik pemilih pemula dapat tercapai.[42]

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan salah satu kajian penting dalam sosiologi hukum yang membahas tingkat keberhasilan suatu aturan hukum yang diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai kemampuan suatu aturan hukum dalam mengatur, memengaruhi, dan membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pembentuk hukum.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan sarana untuk melakukan perubahan sosial dalam masyarakat. Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, hukum harus dapat diterapkan secara efektif, artinya hukum harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh aparatur penegak hukum saja.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa inti permasalahan efektivitas hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya bersifat netral, sehingga pengaruh positif maupun negatif yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[42] Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), 42.

ditimbulkan sangat bergantung pada isi serta kondisi dari faktor-faktor tersebut.[43]

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum atau aturan, yaitu:

a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yang dalam hal ini mencakup undang-undang dalam arti material dan formal. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa agar suatu undang-undang dapat berfungsi secara efektif, maka undang-undang tersebut harus memenuhi beberapa asas, antara lain: (1) undang-undang tidak berlaku surut; (2) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; (3) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; (4) undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; dan (5) undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Dalam konteks program Sekolah Demokrasi, aspek legalitas ini tercermin dari adanya dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, yang secara eksplisit mengamanatkan

[43] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa mentalmitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas hukum. Penegak hukum yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan berkomitmen terhadap tujuan hukum akan mampu melaksanakan tugasnya secara lebih efektif dibandingkan penegak hukum yang hanya berorientasi pada prosedur formal semata.

Dalam konteks pelaksanaan program Sekolah Demokrasi, peran penegak hukum dianalogikan dengan peran komisioner dan staf KPU Kabupaten Jember sebagai pelaksana program. Kompetensi, dedikasi, dan profesionalisme penyelenggara program menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program tersebut mencapai tujuan peningkatan kesadaran politik pemilih pemula.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang memiliki pendidikan

dan keterampilan, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Dengan adanya dukungan tersebut, proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan optimal.

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum yang diharapkan akan mencapai tujuannya. Dalam konteks Sekolah Demokrasi, sarana dan fasilitas yang dimaksud meliputi: ketersediaan anggaran, modul dan materi pendidikan yang berkualitas, ruang kegiatan yang representatif, media pembelajaran yang interaktif, serta sumber daya manusia pelaksana yang kompeten.

d. Faktor Masyarakat

Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sudut pandang tertentu, kondisi dan perilaku masyarakat turut memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan yang besar untuk mematuhi hukum yang dianggap sesuai dengan kesadaran hukumnya. Kesadaran hukum masyarakat mencakup: (1) pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum; (2) pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum; (3)

sikap terhadap peraturan-peraturan hukum; dan (4) pola perilaku hukum.

Dalam konteks penelitian ini, faktor masyarakat berkaitan erat dengan kondisi pemilih pemula di Kabupaten Jember, meliputi tingkat pengetahuan mereka tentang sistem pemilu, sikap terhadap pentingnya hak pilih, serta perilaku politik mereka setelah mengikuti program Sekolah Demokrasi.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak mengenai sesuatu yang dianggap baik sehingga dipertahankan dan dijalankan, serta sesuatu yang dipandang buruk sehingga dihindari. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kebudayaan dalam sistem hukum pada hakikatnya berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat mengenai ukuran baik dan buruk dalam kehidupan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kaitannya dengan efektivitas hukum, terdapat beberapa pasangan nilai yang dianggap penting, seperti nilai ketertiban dan ketenteraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, serta nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. Apabila nilai-nilai tersebut selaras dengan

norma hukum yang berlaku, maka hukum akan lebih mudah diterima, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan program Sekolah Demokrasi, faktor kebudayaan tercermin dari sejauh mana nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, dan kesadaran akan hak pilih telah terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat, khususnya pemilih pemula di Kabupaten Jember.

3. Teori Kesadaran Politik

Teori kesadaran politik menurut Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa kesadaran politik berkaitan dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan politik. Kesadaran politik menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, terutama dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilihan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Ramlan Surbakti, kesadaran politik merupakan tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kepedulian seseorang terhadap sistem politik serta perannya sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi. Kesadaran politik tidak hanya diukur dari sejauh mana seseorang memahami politik secara teoritis, tetapi juga dari sikap serta perhatian yang ditunjukkan terhadap berbagai aktivitas politik. Dalam penelitian ini, indikator kesadaran politik yang digunakan meliputi aspek kognitif, afektif, dan kepedulian politik.

a. Aspek Kognitif

Aspek kognitif merupakan dimensi yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai kehidupan politik. Dimensi ini mencakup pemahaman mengenai sistem politik, proses penyelenggaraan pemilu, hak dan kewajiban warga negara, lembaga-lembaga negara, serta berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai sistem politik, semakin besar peluang individu tersebut untuk berpartisipasi secara rasional dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan aspek kognitif masyarakat, khususnya pemilih pemula, agar mampu mengambil keputusan politik berdasarkan pengetahuan yang memadai.

b. Aspek Afektif

Aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan orientasi seseorang terhadap kehidupan politik. Dimensi ini menunjukkan bagaimana seseorang memandang pentingnya demokrasi, memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara, menghargai hak politik, serta memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam proses politik. Aspek afektif tidak hanya mencerminkan penerimaan terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menunjukkan adanya motivasi internal untuk menggunakan hak politik secara bertanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, pendidikan politik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap positif terhadap kehidupan demokrasi.

c. Aspek Kepedulian Politik

Aspek kepedulian politik merupakan dimensi yang menunjukkan perhatian dan kepekaan seseorang terhadap berbagai perkembangan politik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kepedulian politik ditunjukkan melalui keinginan untuk mengikuti informasi mengenai politik dan pemilu, berdiskusi mengenai isu-isu demokrasi, bersikap kritis terhadap informasi politik, serta memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tingginya kepedulian politik menunjukkan bahwa seseorang tidak bersikap apatis terhadap kehidupan demokrasi, melainkan memiliki kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan politik sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai warga negara.

d. Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik merupakan dimensi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan pengetahuan dan sikap politik ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks pendidikan politik, aspek ini tercermin melalui perilaku aktif dalam mengikuti perkembangan politik, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, melakukan literasi politik secara mandiri, serta berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Dengan demikian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aspek psikomotorik menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap politik yang dimiliki seseorang telah diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.[44]

Ramlan Surbakti juga menjelaskan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara mengenai hak dan kewajiban politik yang dimiliki, termasuk pemahaman seseorang terhadap lingkungan sosial dan politik tempat ia berada. Kesadaran politik menunjukkan sejauh mana individu memahami sistem politik, mengetahui hak pilihnya, serta memiliki kemauan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam aktivitas politik.[45]

Kesadaran politik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai politik, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku masyarakat terhadap kehidupan demokrasi. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran politik tinggi cenderung lebih aktif dalam mengikuti kegiatan politik, menggunakan hak pilih, serta memahami pentingnya partisipasi dalam menentukan kebijakan dan pemimpin negara. Sebaliknya, rendahnya kesadaran politik dapat menyebabkan apatisme politik, golongan putih (golput), dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Dalam konteks pemilih pemula, kesadaran politik sangat penting karena pemilih pemula merupakan kelompok masyarakat yang baru pertama kali terlibat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan

[44] Anita J. Harrow, *A Taxonomy of the Psychomotor Domain: A Guide for Developing Behavioral Objectives* (New York: D. McKay Company, 1972).

[45]Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 144.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pendidikan politik agar pemilih pemula memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui sosialisasi politik, pendidikan demokrasi, maupun program-program pendidikan pemilih seperti Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember.

Menurut Ramlan Surbakti, terdapat beberapa indikator kesadaran politik, yaitu:

a. Pengetahuan mengenai sistem politik dan pemilu;
b. Pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara;
c. Kesadaran menggunakan hak pilih;
d. Sikap terhadap demokrasi dan pemerintahan;
e. Partisipasi dalam kegiatan politik.

Sementara itu, Milbiath menyatakan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran yang dimiliki oleh warga negara, baik secara individu maupun kelompok, untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik adalah suatu kondisi pemahaman dan kepekaan individu terhadap berbagai aspek politik yang mencakup pengetahuan politik, nilai serta orientasi politik. Kondisi ini memungkinkan seseorang untuk memahami situasi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, menilai serta mencari solusi atas permasalahan tersebut, mengambil keputusan,

serta menentukan sikap politiknya, sehingga mendorong keterlibatan aktif dalam upaya perubahan dan pengembangan kehidupan politik.

Adapun untuk mengukur tingkat kesadaran politik, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

a. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara
b. Kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang sah dan memiliki legitimasi
c. Kesadaran untuk mengikuti perkembangan informasi di bidang politik
d. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik[46]

Teori kesadaran politik Ramlan Surbakti relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjadi pisau analisis untuk mengetahui sejauh mana program Sekolah Demokrasi mampu meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula, meningkatkan kesadaran menggunakan hak pilih, serta mendorong partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Teori Demokrasi

Teori demokrasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik yang membahas mengenai kedaulatan rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan serta arah jalannya negara. Secara

[46] Ayuni Nur Fatwa, "Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 DiDesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan 4*, No. 4 (2016), 1618.

etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Oleh sebab itu, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi diartikan sebagai *government of the people, by the people, and for the people*, yakni pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, serta ditujukan untuk kepentingan rakyat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa rakyat menjadi sumber utama legitimasi kekuasaan negara, berperan dalam pelaksanaan kekuasaan melalui partisipasi politik, dan menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Robert A. Dahl berpendapat bahwa tidak terdapat satu teori demokrasi yang bersifat mutlak, melainkan terdapat beragam teori demokrasi (*there is no democratic theory – there are only democratic theories*). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep demokrasi memiliki berbagai penafsiran yang berkembang sesuai dengan dinamika zaman serta kondisi sosial dan politik di setiap negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penerapannya, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sidney Hook mengemukakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan pentingnya didasarkan pada persetujuan mayoritas rakyat yang diberikan secara bebas. Di sisi lain, Terry Lynn Karl mendefinisikan

demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan pemerintah bertanggung jawab kepada warga negara melalui adanya kompetisi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.[47]

Demokrasi juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui teori kontrak sosialnya, Jean Jacques Rousseau menjelaskan bahwa kekuasaan negara bersumber dari kehendak umum (*general will*) masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat serta lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Selain itu, John Locke berpendapat bahwa negara dibentuk untuk menjamin serta melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Oleh sebab itu, kekuasaan pemerintah harus didasarkan pada persetujuan rakyat (*government by consent of the people*). Apabila pemerintah tidak mampu menjalankan amanat rakyat dengan baik, maka pemerintah dapat kehilangan legitimasi atas kekuasaannya.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam negara modern, pelaksanaan demokrasi umumnya dilakukan melalui sistem perwakilan karena jumlah penduduk yang besar serta wilayah negara yang luas menyebabkan demokrasi langsung, sebagaimana diterapkan di Yunani Kuno, sulit untuk dilaksanakan. Oleh

[47] Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 4-5.
[48] Rahadi dan Arlis, *Teori Demokrasi*, 16-19.

karena itu, rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk menjalankan pemerintahan dan mewakili kepentingan masyarakat.

Demokrasi juga memiliki beberapa prinsip pokok, yaitu persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan partisipasi rakyat. Prinsip persamaan menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak politik yang setara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip kebebasan mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, serta terlibat dalam kegiatan politik. Sementara itu, prinsip partisipasi rakyat menegaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam menentukan kebijakan publik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum.[49]

Dalam konteks penelitian ini, teori demokrasi digunakan sebagai landasan untuk memahami pentingnya Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai salah satu bentuk pendidikan politik khususnya bagi pemilih pemula. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik, pemahaman mengenai demokrasi, serta partisipasi politik generasi muda dalam pelaksanaan pemilu. Melalui pendidikan demokrasi tersebut, pemilih pemula diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban politiknya, memiliki kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Rahadi dan Arlis, *Teori Demokrasi*, 13-24.

pemilu, serta dapat berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu semata, tetapi juga menyangkut keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan politik. Oleh sebab itu, pendidikan politik melalui Program Sekolah Demokrasi memiliki peranan penting dalam membentuk pemilih pemula yang memiliki kesadaran politik, sikap kritis, serta partisipasi politik yang baik guna mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas.

5. Konsep Fikih Siyasah Dusturiyah

Fikih siyasah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Secara bahasa, kata fikih berarti pemahaman terhadap hukum-hukum syariat, sedangkan siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengatur, mengurus, atau memimpin. Dengan demikian, fikih siyasah dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur penyelenggaraan, kekuasaan, serta hubungan pemerintah dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.[50] Salah satu bagian penting dalam fikih siyasah adalah siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan kajian yang membahas mengenai ketatanegaraan, konstitusi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[50] Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, 3.

hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu syura (musyawarah), 'adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan maslahah (kemanfaatan).[51]

a. Prinsip Syura (Musyawarah)

Prinsip syura menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Islam mengajarkan bahwa setiap urusan publik sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah agar tercipta keputusan yang adil dan mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: ”juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38).[52]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik,

[51] Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.
[52] Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surah Asy-Syura ayat 38.

termasuk dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Dalam konteks penelitian ini, program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember merupakan bentuk pendidikan politik yang mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, dalam kehidupan demokrasi.[53]

b. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab)

Prinsip amanah menegaskan bahwa kekuasaan dan jabatan merupakan titipan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan dan pendidikan kepada masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran paling baik. kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58).[54]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib menjalankan tugasnya secara amanah dan bertanggung jawab. Dalam penelitian ini, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui program Sekolah Demokrasi agar

[53] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 58.
[54] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa ayat 58.

masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab.[55]

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap pemegang amanah wajib bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat.[56]

c. Prinsip 'Adl (Keadilan)

Prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan tertentu. Pemerintah wajib memberikan hak-hak masyarakat secara proporsional serta menjamin kebebasan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik. Allah SWT berfirman:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَايْتَانِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat". (QS. An-Nahl: 90).[57]

[55] Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, 42.
[56] Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, 708.
[57] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nahl ayat 90.

Prinsip keadilan ini relevan dengan pelaksanaan program Sekolah Demokrasi karena program tersebut memberikan kesempatan kepada pemilih pemula untuk memperoleh pendidikan politik dan pemahaman demokrasi secara setara.[58]

d. Prinsip Maslahah (Kemanfaatan)

Konsep maslahah dalam siyasah dusturiyah menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut A. Djazuli, maslahah merupakan tujuan utama dalam pembentukan kebijakan publik dalam Islam.[59]

Dalam konteks penelitian ini, program Sekolah Demokrasi dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran politik, pemahaman demokrasi, serta partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, teori fikih siyasah dusturiyah relevan digunakan dalam penelitian ini karena program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember sejalan dengan prinsip syura, amanah, keadilan, dan maslahah dalam Islam. Program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat demi terciptanya

[58] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 2003), 64.
[59] Djazuli, *Fiqh Siyasah,* 73.

kehidupan demokrasi yang partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas Program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak berfokus pada data angka atau analisis statistik, melainkan pada pemahaman terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program, respons peserta, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesadaran politik pemilih pemula.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak hanya mengkaji aturan hukum secara normatif, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengetahui bagaimana Program Sekolah Demokrasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jember serta pengaruhnya terhadap kesadaran politik pemilih pemula.

Penelitian ini juga menggunakan tipe studi kasus yang berfokus pada Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember. Tipe studi kasus dipilih agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam pada satu objek tertentu dalam konteks yang nyata. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian menjadi penting karena berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti serta sumber data yang akan diperoleh. Lokasi penelitian dapat berupa wilayah geografis seperti desa, kota, atau kabupaten, maupun lembaga atau organisasi tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan permasalahan yang dikaji agar data yang diperoleh lebih akurat dan relevan.[60]

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditetapkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa KPU Kabupaten Jember merupakan lembaga yang menyelenggarakan program Sekolah Demokrasi yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Selain itu, lokasi ini dinilai strategis karena memiliki keterkaitan langsung dengan pemilih pemula sebagai sasaran program dalam meningkatkan kesadaran politik.

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu peserta Sekolah Demokrasi yang termasuk dalam kategori pemilih pemula. Unit analisis ini dipilih karena penelitian berfokus pada bagaimana program

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 205.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sekolah Demokrasi mempengaruhi kesadaran politik individu sebagai pemilih pemula. Dengan demikian, melalui penentuan lokasi dan unit analisis yang tepat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai efektivitas program yang diteliti.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang berperan sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian tidak diposisikan sebagai sampel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan sebagai informan atau narasumber yang dipilih secara purposive. Teknik purposive ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, penentuan subyek penelitian dilakukan secara selektif agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dan mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, subyek penelitian terdiri dari beberapa pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program Sekolah Demokrasi. Pertama, pihak penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, khususnya divisi atau anggota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pendidikan pemilih. Pihak ini dipilih karena memiliki informasi yang mendalam terkait perencanaan, pelaksanaan, serta tujuan dari program Sekolah Demokrasi.

Kedua, peserta Sekolah Demokrasi yang termasuk dalam kategori pemilih pemula. Kelompok ini menjadi subyek utama penelitian karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

merupakan sasaran dari program yang diteliti. Melalui wawancara dengan peserta, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai pengalaman, pemahaman, serta perubahan kesadaran politik setelah mengikuti program tersebut.

Ketiga, pihak lain yang dianggap relevan, seperti panitia pelaksana atau fasilitator kegiatan Sekolah Demokrasi. Informan tambahan ini berfungsi untuk melengkapi data serta memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas program yang dilaksanakan.

Adapun teknik penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Melalui teknik ini, informan dipilih secara selektif agar memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian serta memahami objek yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi karena bersumber dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam fenomena yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan secara naturalistik dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang terdapat di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih teknik pengumpulan data

yang tepat agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari objek penelitian secara akurat dan mendalam.[61]

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan data yang komprehensif mengenai efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada pihak penyelenggara, peserta Program Sekolah Demokrasi, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara meliputi informasi mengenai pemahaman peserta tentang politik, pengalaman mengikuti program, serta dampak yang dirasakan terhadap kesadaran politik mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

mengenai proses pelaksanaan kegiatan, interaksi antara peserta dan penyelenggara, serta respon peserta terhadap materi yang diberikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan kegiatan, foto, arsip, maupun data resmi yang diperoleh dari KPU Kabupaten Jember. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data pendukung yang berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi hasil temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh makna dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami data secara mendalam serta mampu menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, analisis data menjadi bagian penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian yang diperoleh.[62]

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Model ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data,

[62] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut tidak berlangsung secara terpisah, melainkan dilakukan secara berkesinambungan dan saling berinteraksi selama proses penelitian berlangsung.[63]

a. Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan perhatian, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyaringan terhadap data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai efektivitas Program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian akan dieliminasi sehingga proses analisis menjadi lebih terarah dan sistematis.
b. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis, seperti uraian naratif, tabel, maupun matriks. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan, sehingga proses analisis dan interpretasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data, yaitu dengan merumuskan makna dari data yang telah dianalisis serta melakukan pengecekan ulang terhadap temuan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, 2014), 12-14.

kualitatif, kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat dan mendukung.

Dengan menggunakan teknik analisis data tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang mendalam dan akurat mengenai efektivitas program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh dari lapangan memiliki tingkat kebenaran, ketepatan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, aspek keabsahan data menjadi sangat penting karena hasil penelitian umumnya berbentuk uraian deskriptif dan penafsiran terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu menerapkan berbagai strategi pengujian data guna memastikan kredibilitas temuan, sehingga hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipercaya.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, peningkatan ketekunan dalam pengamatan, triangulasi, serta member check. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dilakukan dengan memperluas durasi penelitian di lapangan agar peneliti dapat memahami konteks secara lebih mendalam serta memperoleh data yang lebih lengkap dan komprehensif. Selain itu, kehadiran yang lebih lama juga membantu membangun hubungan

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 270-274.

yang lebih baik dengan informan, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terpercaya.

Selanjutnya, peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih teliti, konsisten, dan berkelanjutan terhadap objek penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dengan ketekunan yang lebih tinggi, peneliti dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pengumpulan maupun interpretasi data.

Teknik triangulasi digunakan sebagai cara untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, maupun waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mencocokkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan, seperti pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember serta peserta Program Sekolah Demokrasi. Melalui proses tersebut, data yang diperoleh diharapkan dapat saling melengkapi sekaligus memperkuat temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik member check, yaitu proses verifikasi kembali data kepada informan yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan maksud dan pengalaman informan di lapangan. Dengan demikian, tingkat ketepatan dan keabsahan data dapat lebih terjamin karena telah dikonfirmasi langsung oleh sumbernya.

Dengan penerapan berbagai teknik tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan peneliti secara sistematis dari awal hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penyusunan tahapan ini bertujuan agar proses penelitian dapat berlangsung secara terarah, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, tahapan penelitian tidak bersifat kaku, melainkan bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan dinamika serta kondisi yang terjadi di lapangan.[65]

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah penelitian pendahuluan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji. Kegiatan yang dilakukan meliputi studi kepustakaan, penelusuran data awal, serta observasi awal di lokasi penelitian, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai objek penelitian sekaligus merumuskan fokus kajian yang akan diteliti.

Tahap kedua adalah penyusunan desain penelitian. Pada tahap ini, peneliti merancang keseluruhan kerangka penelitian yang mencakup penentuan pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta penetapan subjek penelitian. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[65] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 298-300.

instrumen penelitian, seperti pedoman wawancara dan lembar observasi yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data di lapangan.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian dilakukan dengan berinteraksi langsung bersama informan, yaitu pihak penyelenggara serta peserta Program Sekolah Demokrasi. Data yang diperoleh kemudian dicatat, didokumentasikan, dan dianalisis secara berkelanjutan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait efektivitas program yang diteliti.

Tahap keempat adalah analisis data. Pada tahap ini, seluruh data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir, sehingga peneliti dapat menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Pada tahap ini, hasil penelitian disusun dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku. Laporan tersebut mencakup seluruh bagian penelitian, mulai dari pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran.

Dengan adanya tahapan penelitian yang tersusun secara sistematis, diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan temuan yang valid, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai bagian dari struktur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan KPU Kabupaten Jember merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kewenangan kepada KPU di tingkat kabupaten/kota untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu. Tahapan tersebut meliputi perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu di tingkat kabupaten/kota.[66]

KPU Kabupaten Jember beralamat di Jl. Kalimantan No.64A, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lokasi ini berada di kawasan strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga mendukung pelaksanaan pelayanan kepemiluan, sosialisasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait

[66] Setneg RI, UU No 7 Tahun 2017, Pasal 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam penyelenggaraan pemilu. Keberadaan kantor KPU Kabupaten Jember di pusat wilayah administratif Kabupaten Jember juga mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai tahapan pemilu maupun kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU.[67]

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Kabupaten Jember. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Jember berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, serta aksesibel. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu guna menjamin kualitas demokrasi, khususnya di tingkat daerah.[68]

Selain melaksanakan tahapan pemilu, KPU Kabupaten Jember juga memiliki peran penting dalam pendidikan politik masyarakat, khususnya melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPU berkewajiban melaksanakan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Jember tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara

[67] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, ”Profil KPU Kabupaten Jember”, https://kab-jember.kpu.go.id/

[68] Setneg RI, UU No 7 Tahun 2017, Pasal 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

teknis pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab meningkatkan kesadaran politik masyarakat, termasuk pemilih pemula, agar berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.[69]

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di daerah dengan jumlah pemilih yang besar, KPU Kabupaten Jember memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Jawa Timur, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada efektivitas kinerja KPU Kabupaten Jember dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu, termasuk pendidikan pemilih. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPU Kabupaten Jember melaksanakan berbagai program sosialisasi politik, salah satunya adalah program Sekolah Demokrasi, yaitu program pendidikan politik yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, terhadap pentingnya demokrasi dan pemilu.[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Program Sekolah Demokrasi menjadi salah satu bentuk konkret upaya KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Program ini memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, pentingnya kesadaran politik, tahapan pemilu, serta nilai-nilai demokrasi kepada peserta, terutama generasi muda yang baru

[69] Setneg RI, UU No. 7 tahun 2017, pasal 448.
[70] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, ”Program Sosialisai Pendidikan Pemilih”, https://kab-jember.kpu.go.id/

pertama kali menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, KPU Kabupaten Jember tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai agen pendidikan demokrasi yang berkontribusi dalam membangun budaya politik masyarakat yang partisipatif.[71]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa KPU Kabupaten Jember merupakan lembaga strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas di tingkat daerah. Melalui kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu serta pendidikan politik masyarakat, KPU Kabupaten Jember memiliki posisi penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula.

2. Visi dan Misi KPU Kabupaten Jember

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPU Kabupaten Jember mengacu pada visi dan misi kelembagaan yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pedoman utama. Visi tersebut menjadi arah strategis bagi seluruh jajaran KPU, termasuk KPU Kabupaten Jember, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis.

Visi KPU Kabupaten Jember adalah menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL.[72] Visi tersebut menggambarkan komitmen KPU Kabupaten Jember untuk menjadi

[71] KPU Jember, "Program Sosialisasi".
[72] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, "Visi Misi KPU Kabupaten Jember", https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/visi-misi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

lembaga penyelenggara pemilu yang independen dari pengaruh pihak manapun, memiliki profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL) menjadi dasar utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU Kabupaten Jember memiliki misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat;
b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu;
c. Menyusun regulasi kepemiluan yang memberikan kepastian hukum serta bersifat progresif dan partisipatif;
d. Meningkatkan kualitas layanan kepemiluan bagi seluruh pemangku kepentingan;
e. Meningkatkan partisipasi serta kualitas pemilih dalam proses pemilu;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penyelenggaraan pemilu untuk kepentingan demokrasi yang lebih baik.[73]

Misi tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember tidak hanya berfokus pada pelaksanaan teknis pemilu, tetapi juga pada peningkatan kualitas demokrasi melalui penguatan partisipasi masyarakat.

[73] KPU Jember, "Visi Misi".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu misi yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Dalam hal ini, program Sekolah Demokrasi menjadi bagian dari strategi KPU Kabupaten Jember untuk mewujudkan pemilih yang sadar politik, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan visi dan misi tersebut, KPU Kabupaten Jember diharapkan mampu menjadi lembaga yang profesional dan terpercaya dalam menyelenggarakan pemilu serta berperan aktif dalam membangun budaya demokrasi masyarakat.

3. Struktur KPU Kabupaten Jember

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPU Kabupaten Jember memiliki struktur organisasi yang terdiri atas unsur komisioner dan sekretariat. Struktur ini dibentuk agar pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan profesional. Secara kelembagaan, KPU Kabupaten Jember dipimpin oleh lima orang komisioner yang masing-masing memiliki pembagian divisi tugas tertentu, serta didukung oleh sekretariat sebagai unsur administratif dan teknis operasional.[74]

Komisioner KPU Kabupaten Jember terdiri atas seorang ketua yang juga merangkap sebagai anggota, serta empat anggota lainnya. Setiap anggota membawahi divisi tertentu sesuai dengan pembagian tugas yang

[74] Setneg RI, UU No 7 Tahun 2017, Pasal 27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

telah ditetapkan, antara lain Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan dan Logistik, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Divisi Hukum dan Pengawasan. Pembagian divisi tersebut dimaksudkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan, sehingga setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing bidang secara optimal.[75]

Berikut adalah bagan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember:

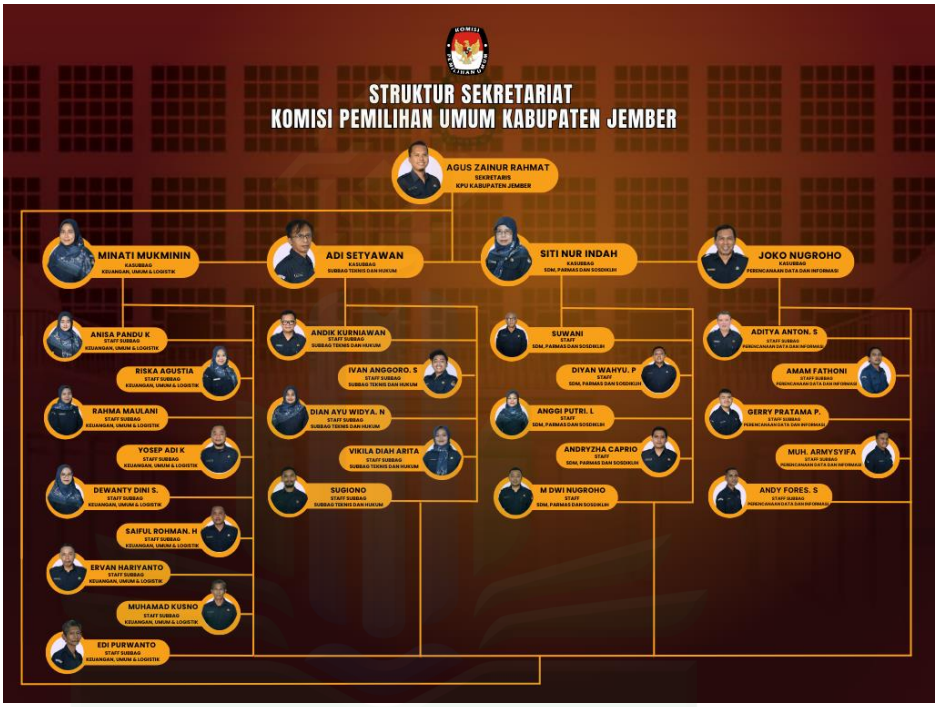
KOMISIONER KPU KABUPATEN JEMBER



Selain komisioner, KPU Kabupaten Jember juga memiliki sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekretariat bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada komisioner dalam penyelenggaraan pemilu. Di dalam sekretariat terdapat beberapa subbagian, seperti Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Subbagian Teknis dan Hukum, Subbagian SDM, Parmas dan Sosdiklih,

[75] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, ”Profil KPU Kabupaten Jember”, https://kab-jember.kpu.go.id/

serta Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi. Masing-masing subbagian memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Jember secara keseluruhan. [76]



Gambar: 4.1
Bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Penjelasan terkait gambar bagan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember di atas sebagai berikut:

a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

1.) Ketua KPU: Dessi Anggraeni.

2.) Anggota Divisi Teknis dan Penyelenggaraan: Hendra Wahyudi.

3.) Anggota Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih: Andi Wasis.

[76] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 197.

4.) Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan: Zeni Musafa.

5.) Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

b. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum: Agus Zainur Rahmat.

c. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik: Minati Mukminin.

d. Kasubag Teknis dan Hukum: Adi Setyawan.

e. Kasubag SDM, Parmas dan Sosdiklih: Siti Nur Indah.

f. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi: Joko Nugroho.

g. Staff Pelaksana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

1.) Staff Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik: Anisa Pandu K., Riska Agustia, Rahma Maulani, Yosep Adi K., Dewanty Dini S., Saiful Rohman H., Ervan Hariyanto, Muhamad Kusno, Edi Purwanto.

2.) Staff Pelaksana Teknis dan Hukum: Andik Kurniawan, Ivan Anggoro S., Dian Ayu Widya N., Vikila Dyah Arita, Sugiono.

3.) Staff Pelaksana SDM, Parmas dan Sosdiklih: Suwani, Diyan Wahyu P., Anggi Putri L., Andryzha Caprio, M. Dwi Nugroho.

4.) Staff Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi: Aditya Anton S., Amam Fathoni, Gerry Pratama P., Muh. Armysyifa, Andy Fores S.

Struktur organisasi ini memungkinkan KPU Kabupaten Jember melaksanakan berbagai program penyelenggaraan pemilu dan pendidikan politik secara lebih terarah. Dalam konteks penelitian ini, divisi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program Sekolah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demokrasi adalah Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih, karena divisi ini bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula.[77]

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, KPU Kabupaten Jember dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat melalui berbagai program pendidikan pemilih.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi yang Diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Jember

a. Latar Belakang Program Sekolah Demokrasi

Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember merupakan respons kelembagaan terhadap tantangan nyata yang dihadapi dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Latar belakang pelaksanaan program ini tidak dapat dilepaskan dari konteks besarnya jumlah pemilih muda di Kabupaten Jember serta kewajiban hukum yang diemban oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pendidikan pemilih.

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, Kabupaten Jember mencatat jumlah pemilih sebesar 1.972.216

[77] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, ”Program Sosialisai Pendidikan Pemilih”, https://kab-jember.kpu.go.id/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pemilih.[78] Besarnya jumlah pemilih tersebut mendorong KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan pendidikan pemilih, khususnya kepada kalangan pemilih pemula yang dinilai rentan terhadap rendahnya pemahaman politik dan apatisme demokrasi. Melalui program Sekolah Demokrasi, KPU berupaya memberikan pemahaman demokrasi dan kepemiluan kepada generasi muda agar mampu menjadi pemilih yang cerdas dan partisipatif.

Secara yuridis, kewajiban KPU untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 448 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat.[79] Lebih lanjut, Pasal 449 undang-undang yang sama menegaskan bahwa pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu.[80] Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum juga mengamanatkan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan KPU.[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, ”Daftar Pemilih tetap (DPT)”, https://kab-jember.kpu.go.id/index.php/blog/read/daftar-pemilih-tetap-dpt-kpu-kabupaten-jember
[79] Setneg RI, UU No 7 Tahun 2017, Pasal 448 ayat (1).
[80] Setneg RI, UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 449.
[81] PKPU No. 9 Tahun 2022, Pasal 2 dan Pasal 10.

Selain dorongan regulatif, latar belakang program ini juga bersumber dari kondisi empiris di lapangan. Pihak KPU Kabupaten Jember menyadari bahwa di luar tahapan penyelenggaraan pemilu, terdapat tanggung jawab kelembagaan yang tidak kalah pentingnya, yakni mendidik Masyarakat khususnya generasi muda agar menjadi pemilih yang cerdas dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Andryzha Caprio, Staf KPU Jember bagian SDM, Parmas, dan Sosdiklih:

> "Di luar tahapan itu KPU juga punya wewenang tanggung jawab melaksanakan pendidikan pemilih. Maka salah satu opsinya adalah di tengah efisiensi juga karena kita nggak bisa keluar, kita mengundang adik-adik SMA kalau yang pertama itu, terutama mereka itu yang menjadi pengurus OSIS. Dalam pelaksanaannya mereka kita berikan materi, kita berikan informasi seputar kepemiluan dengan harapan mereka itu kan siap nanti untuk menjadi pemilih yang cerdas."[82]

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa program Sekolah Demokrasi lahir sebagai wujud konkret komitmen KPU Kabupaten Jember dalam menjalankan fungsi pendidikan politik, di samping fungsi teknisnya sebagai penyelenggara pemilu. Dengan kondisi anggaran yang terbatas akibat kebijakan efisiensi, KPU Jember memilih format pengundangan peserta ke kantor sebagai solusi pelaksanaan yang tetap efektif dan efisien.

Dengan demikian, latar belakang Program Sekolah Demokrasi di KPU Kabupaten Jember dibangun di atas dua fondasi utama:

[82] Andryzha Caprio selaku Staff SDM, Parmas, dan Sosdiklih, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 Mei 2026.

pertama, mandat hukum yang mengharuskan KPU menyelenggarakan pendidikan pemilih; dan kedua, kebutuhan nyata di lapangan untuk membekali generasi muda khususnya pemilih pemula dengan pengetahuan dan kesadaran politik yang memadai agar mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

b. Tujuan Program Sekolah Demokrasi

Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember memiliki tujuan yang bersifat komprehensif, melampaui sekadar sosialisasi teknis pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Wasis selaku Komisioner KPU Jember Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih, tujuan utama program ini adalah membentuk pemahaman demokrasi yang menyeluruh baik secara substantif maupun prosedural pada diri pemilih pemula. Secara lebih rinci, Andi Wasis menjelaskan tujuan program sebagai berikut:

> "Tujuan utamanya adalah untuk paham terhadap demokrasi, baik yang substansi maupun demokrasi yang prosedural, makanya materinya tidak hanya sebatas pemungutan dan penghitungan ataupun pemilu maupun pemilihan, tapi ada materi-materi yang sifatnya itu keilmuan, seperti filsafat, karena apapun kalau kita bicara demokrasi rujukan kita ya filsafat. Makanya siapa yang pertama kali bicara demokrasi, seperti Montesque, seperti Plato, seperti Aristoteles. Munculnya konsep negara demokrasi kan dari mereka, nah itu harapannya kami berharap kepada mahasiswa maupun peserta dari SMA itu paham demokrasi itu ternyata sangat luas tidak hanya sekedar dari rakyat oleh rakyat dan substansinya demokrasi itu kita ajarkan disitu, sehingga outputnya ketika nanti ada pemilihan maupun pemilu itu mereka mau terlibat aktif di dalam penyelenggaraan."[83]

[83] Andi Wasis selaku Komisioner divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 Mei 2026.

Berdasarkan pernyataan tersebut, setidaknya terdapat tiga lapisan tujuan yang hendak dicapai oleh Program Sekolah Demokrasi. **Pertama**, tujuan kognitif (pengetahuan), yakni memberikan pemahaman mendalam mengenai hakikat demokrasi secara filosofis mulai dari akar pemikiran Plato, Aristoteles, dan Montesquieu, hingga bagaimana nilai-nilai demokrasi berkembang dalam konteks kenegaraan modern. KPU Jember menyadari bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur pemilihan, melainkan mencakup nilai-nilai substansial seperti kebebasan, keadilan, kedaulatan rakyat, dan partisipasi aktif warga negara.

Kedua, tujuan afektif (sikap dan kesadaran), yaitu mendorong tumbuhnya kesadaran politik pemilih pemula agar mereka tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. KPU Jember berharap bahwa setelah mengikuti program ini, para peserta menyadari betapa pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan politik, tidak hanya pada saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat sehari-hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketiga, tujuan perilaku (partisipasi), yakni mendorong pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu tidak sekadar sebagai pemilih pasif, tetapi juga berpotensi menjadi relawan demokrasi, petugas pemilu, atau agen perubahan yang mampu memengaruhi lingkungannya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Andi

Wasis yang menekankan bahwa kontribusi pemilih pemula sangat besar di Kabupaten Jember:

> ”Sehingga outputnya ketika nanti ada pemilihan maupun pemilu itu mereka mau terlibat aktif di dalam penyelenggaraan jadi tidak hanya sekedar memilih karena kontribusinya pemilih pemula itu besar jumlahnya tidak sedikit di Kabupaten Jember.”[84]

Sejalan dengan itu, Andryzha Caprio menambahkan bahwa tujuan program bukan hanya menciptakan pemilih yang cerdas secara individual, tetapi juga menghasilkan output kelembagaan bagi KPU sebagai instrumen demokrasi yang mencerdaskan masyarakat:

> ”Ini bagian dari komitmen KPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu tapi juga sebagai output dari instrumen demokrasi yang mencerdaskan pemilih.”[85]

Tujuan-tujuan program tersebut sejalan dengan amanat Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu.[86] Dengan demikian, Program Sekolah Demokrasi tidak hanya merespons kewajiban regulatif, tetapi juga mencerminkan visi jangka panjang KPU Kabupaten Jember dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Andi Wasis, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.
[85] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.
[86] PKPU No. 9 Tahun 2022, Pasal 3.

c. Sasaran Peserta Program Sekolah Demokrasi

Penentuan sasaran peserta dalam Program Sekolah Demokrasi dilakukan secara selektif oleh KPU Kabupaten Jember dengan mempertimbangkan efektivitas penyebaran dampak program. KPU tidak sekadar mengundang pemilih pemula secara acak, melainkan menargetkan kelompok yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan jaringan sosial yang luas di lingkungannya, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai pelopor atau agen demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Wasis, sasaran utama program adalah mereka yang aktif dalam organisasi, baik di tingkat SMA maupun perguruan tinggi:

> "Awalnya memang sekolah demokrasi itu kita khususkan untuk mereka-mereka yang aktif di dalam organisasi di level SMA maupun di level perguruan tinggi. Di SMA itu kemarin yang kita libatkan pengurus-pengurus OSIS Nah, saya pikir pengurus-pengurus OSIS iu belum begitu memahami, belum begitu paham terkait dengan demokrasi termasuk teman-teman mahasiswa meskipan materinya itu kita bedakan."[87]

Berdasarkan penuturan tersebut, dapat dipahami bahwa KPU Kabupaten Jember menetapkan dua kategori sasaran utama peserta. **Pertama**, siswa SMA yang menjabat sebagai pengurus OSIS. Kelompok ini dipilih karena dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan sekolah. Dengan membekali pengurus OSIS pengetahuan demokrasi, diharapkan mereka dapat menyebarluaskan nilai-nilai tersebut kepada teman-teman sebayanya yang tidak mengikuti program secara langsung.

[87] Andi Wasis, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Andryzha Caprio mengonfirmasi bahwa dari 10 sekolah yang diundang, semuanya hadir, dan para peserta rata-rata merupakan ketua dan sekretaris OSIS:

> "Dari 10 sekolah vang kita undang, semuanya hadir. Dan semuanya pengurus OSIS, dan rata-rata ketua dan sekretarisnya karena kita undang tiga orang ya."[88]

Kedua, mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Kelompok ini dipilih karena memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih matang dan jaringan sosial yang lebih luas di masyarakat. Namun demikian, KPU Jember menyesuaikan materi yang diberikan kepada dua kelompok ini, mengingat perbedaan tingkat pengetahuan dan kematangan berpikir antara siswa SMA dan mahasiswa.

Pemilihan sasaran peserta yang aktif berorganisasi ini didasarkan pada strategi multiplikasi dampak (multiplier effect). KPU Jember berharap bahwa para alumni Sekolah Demokrasi dapat menjadi "pelopor" atau "virus" demokrasi yang menyebarkan nilai-nilai dan pengetahuan yang mereka peroleh kepada generasi muda yang lebih luas. Sebagaimana ditegaskan oleh Andi Wasis:

> "Jadi kita berharapnya mereka mau menjadi pelopor, menjadi virus, untuk generasi pemuda-pemuda yang mungkin saja tidak aktif di organisasi OSIS maupun organisasi mahasiswa."[89]

Strategi ini relevan dengan konsep pendidikan politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, bahwa peningkatan kesadaran

[88] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.
[89] Andi Wasis, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

politik tidak cukup dilakukan secara individual, melainkan perlu disebarkan melalui agen-agen sosial yang memiliki pengaruh di komunitasnya.[90] Dengan memilih peserta yang memiliki posisi strategis dalam lingkungan sosial mereka, KPU Jember secara tidak langsung membangun jaringan agen demokrasi di tingkat akar rumput.

Menariknya, Andi Wasis juga mengakui bahwa sebelum program ini dilaksanakan, terdapat asumsi awal bahwa pengurus OSIS dan mahasiswa sudah cukup memahami demokrasi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih perlu diperdalam, sehingga program Sekolah Demokrasi menjadi semakin relevan dan dibutuhkan.

d. Materi dan Metode Program Sekolah Demokrasi

Salah satu aspek yang membedakan Program Sekolah Demokrasi dari kegiatan sosialisasi pemilu biasa adalah kedalaman dan keluasan materi yang diberikan kepada peserta, KPU Kabupaten Jember merancang kurikulum program yang tidak hanya membahas aspek teknis kepemiluan, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis dan tantangan demokrasi secara lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andryzha Caprio, terdapat tiga materi utama yang diberikan dalam Program Sekolah Demokrasi, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 144-152.

1.) Demokrasi di Indonesia dan Kepartaian

Materi pertama mencakup pengenalan konsep demokrasi secara filosofis, mulai dari akar pemikiran para filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, perkembangan konsep demokrasi di berbagai belahan dunia, hingga sistem demokrasi dan kepartaian yang berlaku di Indonesia. Andryzha Caprio menjelaskan:

> ”Yang pertama soal Demokrasi di Indonesia dan Kepartaian. Jadi mereka itu kita berikan yang pertama soal pengetahuan demokrasi secara filsafat, kata Pak Andi itu kan, bagaimana demokrasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dan sistem kepartaian kita juga.”[91]

2.) Proyeksi dan Tantangan Demokrasi

Materi kedua bersifat analitis dan kritis, mengajak peserta untuk merefleksikan kondisi demokrasi Indonesia saat ini, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi, serta membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan negara-negara lain. Andryzha Caprio menambahkan:

> “Yang kedua soal Proyeksi dan Tantangan Demokrasi. Jadi apa sih tantangan demokrasi kita? Apakah pemilu itu sudah sesuai atau ada sesuatu yang mungkin bisa dikomparasikan dengan pemilu, seperti apa gitu kan.”[92]

Hal ini juga diperkuat oleh Andi Wasis yang memberikan contoh konkret perbandingan sistem pemilu Indonesia dengan negara lain:

> ”Bagaimana penyelenggaraan pemilu itu jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang juga menganut

[91] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.
[92] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

> sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin di masing-masing negara. Di Indonesia ini kan cuma sehari, memilih sampai pemungutan dan hasil perhitungan suara selesai dalam satu hari. kalau di negara lain ada yang sampai 2 bulan, sampat 20 hari. Contoh seperti di Brazil dan ada banyak sekali metode-metode pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung."

3.) Sistem dan Tata Kelola Kepemiluan

Materi ketiga bersifat teknis dan praktis, mencakup penjelasan mengenai siklus penyelenggaraan pemilu di Indonesia mulai dari tahap pra-pemilu, pelaksanaan pemilu, hingga pasca-pemilu termasuk regulasi yang mengaturnya dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Andryzha Caprio menjelaskan:

> "Yang ketiga adalah Sistem dan Tata Kelola Kepemiluan. Tentunya pemilu itu tidak berdiri tunggal ya, jadi ada pra-pemilu, pemilu, pasca-pemilu. Kita siapkan soal regulasinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, terus pasca-pemilu itu ada bagaimana menghadapi gugatan, bagaimana kita menghadapi persidangan, sengketa pemilu dan lain sebagainya."[93]

Ketiga materi tersebut mencerminkan pendekatan yang holistik dalam pendidikan demokrasi yakni menggabungkan dimensi teoretis (filsafat demokrasi), analitis (tantangan dan proyeksi), dan praktis (tata kelola kepemiluan). Pendekatan ini sejalan dengan konsep pendidikan demokrasi yang dikemukakan oleh Zamroni, bahwa pendidikan demokrasi harus mampu membentuk warga negara yang memahami

[93] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

nilai-nilai demokrasi sekaligus mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata.[94]

Adapun metode pelaksanaan program menggabungkan dua pendekatan utama. Pertama, metode ceramah dan pemaparan materi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Kedua, metode diskusi interaktif melalui sesi tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk mengeksplorasi dan memperdalam pemahaman mereka. Andi Wasis menyampaikan:

> ”Peserta sangat aktif ya, sangat aktif dalam sesi diskusi. Jadi selain pemaparan materi dari narasumber, kita juga memberikan sesi waktu untuk tanya jawab. Hampir semua peserta aktif dalam diskusi yang kami selenggarakan.”[95]

Metode diskusi interaktif ini penting karena mendorong pemilih pemula tidak hanya menjadi penerima informasi yang pasif, melainkan menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran demokrasi. Dengan demikian, program ini tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berargumentasi peserta dalam isu-isu demokrasi dan kepemiluan.

e. Proses Pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi

Pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi olch KPU Kabupaten Jember dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terencana, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kegiatan, program ini

[94] Andi Wasis, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.
[95] Zamroni, *Pendidikan Demokrasi*, 15-18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 dengan mengusung tema "Membangun Kesadaran Demokrasi Generasi Muda". Kegiatan berlangsung di kantor KPU Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Kalimantan No.64A, Sumbersari, Kabupaten Jember.[96]

Dalam hal persiapan, KPU Kabupaten Jember menginisiasi program dengan mengundang sekolah-sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Jember. Sebanyak 10 sekolah diundang untuk mengirimkan perwakilan pesertanya. Setiap sekolah mengirimkan tiga orang peserta yang merupakan pengurus inti OSIS umumnya terdiri dari ketua dan sekretaris OSIS sehingga total peserta dari jenjang SMA berjumlah sekitar 30 orang. Andryzha Caprio menegaskan:

> ”Dari 10 sekolah yang kita undang, semuanya hadir. Dan semuanya pengurus OSIS, dan rata-rata ketua dan sekretarisnya karena kita undang tiga orang ya. Artinya menunjukkan usaha kami, upaya kami dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih itu disambut baik oleh pihak-pihak yang kami undang.”[97]

Kehadiran seluruh peserta yang diundang merupakan indikator awal yang positif dan menunjukkan bahwa program ini mendapat sambutan baik dari pihak sekolah dan peserta. Selain itu, proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan resmi dari Komisioner KPU Kabupaten Jember, yang memberikan pengantar mengenai tujuan dan pentingnya program Sekolah Demokrasi. Sambutan ini juga berfungsi sebagai motivasi awal bagi para peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[96] Dokumentasi Kegiatan Sekolah Demokrasi KPU Kabupaten Jember, 30 September 2025.

[97] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

Inti kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Eko Suwargono, M.Hum. sebagai narasumber pertama, dan Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA. sebagai narasumber kedua. Masing-masing narasumber menyampaikan materi yang telah disiapkan sesuai dengan kompetensi akademik dan praktisnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta secara aktif.[98]

Sesi diskusi tanya jawab menjadi bagian yang paling dinamis dalam pelaksanaan program ini. Andi Wasis mendeskripsikan suasana kegiatan:

> ”Peserta sangat aktif ya, sangat aktif dalam sesi diskusi. Jadi selain pemaparan materi dari narasumber, kita juga memberikan sesi waktu untuk tanya jawab. Hampir semua peserta aktif dalam diskusi yang kami selenggarakan. Artinya apa artinya mereka ternyata juga kalau dianggap apatis ya tidak juga, ya mungkin memang pesertanya kita pilih temen temen yang organisasi, yang memiliki latar belakang yang aktif di dunia organisasi.”[99]

Keaktifan peserta dalam sesi diskusi ini mengindikasikan bahwa program berhasil menciptakan ruang pembelajaran yang partisipatif. Para peserta tidak hanya menyimak paparan materi, tetapi juga berani mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan mendiskusikan isu-isu demokrasi secara kritis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[98] Dokumentasi Kegiatan, 30 September 2025.
[99] Andi Wasis, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

Andryzha Caprio juga menambahkan harapan yang lebih luas terkait dampak program terhadap kehidupan demokratis peserta di lingkungan mereka masing-masing:

> ”Tentunya harapannya mereka juga antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena mereka mungkin menganggap kegiatan ini juga punya manfaat ya sebagai literatur kepemiluan dan harapannya bisa diterapkan di sekolah. Salah satunya mungkin pemilihan Ketua OSIS, bahkan lingkup paling kecilnya bagaimana memilih Ketua Kelas dengan sistem demokrasi secara langsung.”[100]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember tidak hanya berorientasi pada dampak jangka pendek berupa pengetahuan teknis, tetapi juga menginginkan dampak jangka panjang berupa perubahan budaya demokrasi di tingkat sekolah dan komunitas peserta. Program Sekolah Demokrasi diharapkan menjadi ”benih” yang tumbuh dan berkembang dalam ekosistem sosial para pesertanya.

f. Kendala dalam Pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi

Meskipun Program Sekolah Demokrasi berjalan sesuai dengan ekspektasi. pelaksanaannya tidak terlepas dari sejumlah kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Jember. Kendala-kendala tersebut berpotensi memengaruhi kualitas dan jangkauan program jika tidak ditangani dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Wasis dan Andryzha Caprio, terdapat dua kendala utama yang diidentifikasi.

[100] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1) Keterbatasan Narasumber yang Kompeten

Kendala yang paling dominan diungkapkan oleh kedua narasumber adalah sulitnya mencari narasumber yang memiliki kompetensi spesifik di bidang filsafat demokrasi dan kepemiluan. Andi Wasis menguraikan:

> ”Kendalanya kita susah mencari narasumber yang kompeten. Karena di Jember itu tidak ada yang jurusan filsafat, adanya jurusan sejarah. Dan kita berharapnya ada ahli dari kampus yang ada di Jember jurusan filsafat. Kemudian kita juga berharap ada NGO yang konsen bicara terkait kepemiluan dan demokrasi. Jadi itu susahnya kita nyari narasumber yang betul-betul kompeten, tapi alhamdulillah meskipun Jember ini tergolong kota yang tidak begitu besar SDMnya cukup mumpuni untuk bicara demokrasi di level temen-temen SMA maupun mahasiswa di wilayah Kabupaten Jember.”[101]

Hal senada juga disampaikan oleh Andryzha Caprio:

> ”Untuk menentukan siapa yang bisa menjadi narasumber. Konsentrasi kami di KPU tentang kepemiluan, tapi di luar materi itu kita juga perlu narasumber yang punya kompetensi tentunya, berbicara soal demokrasi, soal bagaimana hukum tata negara kita, korelasinya dengan demokrasi. Karena memang berbicara demokrasi kompleks, maka kita butuh orang yang kompeten.”[102]

Kendala ini mencerminkan kondisi riil ekosistem akademik di Kabupaten Jember, di mana belum terdapat program studi filsafat secara khusus di perguruan tinggi setempat. KPU Jember harus memutar otak untuk menemukan tenaga ahli yang mampu menyampaikan materi demokrasi secara mendalam namun tetap mudah dipahami oleh peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

[101] Andi Wasis, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.
[102] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

2) Keterbatasan Anggaran akibat Kebijakan Efisiensi

Kendala kedua yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi pemerintah. Andryzha Caprio menjelaskan dampaknya terhadap pelaksanaan program:

> "Yang kedua mungkin soal anggaran ya. Bagaimanapun kami selaku pelaksana juga sesuai dengan instruksi Presiden tentunya soal efisiensi, kita tidak bisa memfasilitasi banyak ya. Tidak bisa memfasilitasi transport, terus uang saku, karena memang ada kebijakan efisiensi. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala ya, tapi Alhamdulillah kita masih bisa fasilitasi yang lain."[103]

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada kemampuan KPU Jember untuk memberikan fasilitas penunjang bagi peserta, seperti transportasi dan uang saku. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat kehadiran dan partisipasi peserta, terutama bagi mereka yang berdomisili jauh dari lokasi kegiatan. Meskipun demikian, KPU Jember masih mampu mengupayakan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kelancaran program.

Kedua kendala tersebut pada dasarnya merupakan tantangan eksternal yang berasal dari kondisi lingkungan (keterbatasan ahli di daerah) dan kebijakan nasional (efisiensi anggaran). Kendala ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan program ke depan agar tidak menghambat pencapaian tujuan program secara optimal.[104]

g. Upaya Pengembangan Program Sekolah Demokrasi ke Depan

[103] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.
[104] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8-9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KPU Kabupaten Jember memiliki kesadaran penuh bahwa Program Sekolah Demokrasi yang telah dilaksanakan baru merupakan langkah awal dari sebuah perjalanan panjang dalam membangun budaya demokrasi di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pihak KPU Jember telah merancang sejumlah upaya pengembangan program agar dapat berjalan lebih baik, lebih luas, dan lebih berkelanjutan di masa mendatang.

Andryzha Caprio memaparkan rencana pengembangan program secara komprehensif:

> "Tentu saja upaya yang kami lakukan dari Sekolah Demokrasi ini adalah terus menstimulasikan atau membuat agenda agenda serupa. Kalau kemarin program Sekolah Demokrasi ini ada materi-materi yang berkelanjutan, tentu saja nanti ke depan terus dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Yang ketiga harapannya Sekolah Demokrasi tidak hanya dilaksanakan satu tahun satu atau dua kali, harapannya nanti ketika kita punya cukup kemampuan melaksanakan itu kita laksanakan sebanyak-banyaknya."[105]

Berdasarkan pernyataan tersebut, setidaknya terdapat tiga arah pengembangan yang direncanakan oleh KPU Kabupaten Jember.

1) Kontinuitas dan Keberlanjutan Program

KPU Jember berkomitmen untuk terus menyelenggarakan program-program serupa secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai kegiatan insidental. Materi yang diberikan juga dirancang agar bersifat berkelanjutan, di mana setiap sesi membangun pemahaman di atas sesi sebelumnya. Dengan demikian, peserta yang telah

[105] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengikuti satu sesi diharapkan dapat terus terlibat dalam sesi-sesi berikutnya untuk memperdalam pengetahuan mereka.

2) Perluasan Jangkauan Sasaran

KPU Jember berencana untuk memperluas jangkauan program kepada lebih banyak sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Jember. Selain itu, frekuensi pelaksanaan juga akan ditingkatkan agar lebih banyak pemilih pemula yang mendapat kesempatan untuk mengikuti program ini.

3) Peningkatan Kualitas Demokrasi Lokal

KPU Jember merumuskan tujuan jangka panjang yang lebih besar dari sekadar penyelenggaraan program, yakni terciptanya peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Jember secara keseluruhan. Andryzha Caprio mengekspresikan harapan ini:

> ”Karena itu juga menjadi bagian dari ikhtiar kami membentuk generasi muda pemilih yang cerdas. Tentu saja dengan adanya Sekolah Demokrasi ini kami berharap kualitas demokrasi di Kabupaten Jember khususnya itu bisa lebih baik lagi. Pemilih-pemilihnya juga banyak yang bisa berkontribusi, orang-orangnya juga banyak berkontribusi, tingkat golput menurun, apatisme terhadap politik juga menurun. Itulah harapannya kami.”[106]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember memandang Program Sekolah Demokrasi bukan sekadar sebagai kewajiban regulatif yang harus dipenuhi, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat di tingkat lokal. Target konkret yang diharapkan mencakup penurunan

[106] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

angka golput, berkurangnya apatisme politik generasi muda, serta peningkatan kontribusi aktif masyarakat dalam setiap proses demokrasi.

Selain rencana pengembangan yang bersifat internal, KPU Jember juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga akademik dan NGO (*Non-Governmental Organization*) yang fokus pada isu kepemiluan dan demokrasi, untuk mengatasi keterbatasan narasumber yang selama ini menjadi kendala utama. Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat memperkuat kualitas materi yang disampaikan sekaligus memperluas jaringan dukungan bagi program pendidikan pemilih.

Dengan demikian, upaya pengembangan Program Sekolah Demokrasi yang direncanakan oleh KPU Kabupaten Jember mencerminkan komitmen kelembagaan yang kuat dalam mewujudkan pendidikan politik yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan misi KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu.[107]

2. Efektivitas Program Sekolah Demokrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Jember

Fokus penelitian kedua ini berupaya mengkaji secara mendalam sejauh mana Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh

[107] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, "Visi Misi KPU Kabupaten Jember", https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/visi-misi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember mampu meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak penyelenggara, yakni Komisioner KPU Jember Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih, staf pelaksana, serta empat orang peserta yang mengikuti kegiatan Sekolah Demokrasi pada tanggal 30 September 2025. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan dimensi-dimensi kesadaran politik yang mencakup aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), kepedulian, dan psikomotorik terhadap isu-isu demokrasi.

Kesadaran politik merupakan tingkat pemahaman individu terhadap sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kegiatan, efektivitas program ini dapat diidentifikasi dari beberapa indikator utama yang saling menguatkan satu sama lain.

a. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Demokrasi dan Kepemiluan

Salah satu dimensi yang paling fundamental dalam membentuk kesadaran politik adalah aspek pengetahuan atau kognitif, yakni seberapa jauh peserta memperoleh dan memahami informasi mengenai demokrasi, sistem kepemiluan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan para peserta, program Sekolah Demokrasi dinilai berhasil memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tambahan pengetahuan yang signifikan, khususnya bagi mereka yang sebelumnya hanya mendapatkan pendidikan politik pada tataran permukaan di jenjang pendidikan formal.

Affantino mengungkapkan bahwa program ini memberikan pemahaman baru mengenai fungsi dan dampak pemilu yang selama ini belum pernah ia peroleh secara mendalam di sekolah:

> ”Iya, karena sebelumnya saya belum terlalu memahami mengapa pemilu itu penting. Setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi tahu kalau pemilu bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah pembangunan negara kedepannya.”[108]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sebelum mengikuti program, Affantino memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fungsi pemilu. Setelah mengikuti Sekolah. Demokrasi, ia tidak lagi memandang pemilu sekadar sebagai ritual pencoblosan, melainkan sebagai instrumen penentu arah kebijakan dan pembangunan negara. Pergeseran perspektif seperti ini merupakan salah satu tanda paling nyata dari keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran politik pada tataran kognitif.

Senada dengan pernyataan di atas, Jefri juga menyampaikan adanya perubahan cara pandang terhadap pemilu yang sebelumnya ia anggap sebagai rutinitas biasa:

> ”Iya, karena dari kegiatan tersebut saya jadi mengetahui bahwa satu suara masyarakat bisa mempengaruhi hasil pemilu. Sebelumnya saya menganggap pemilu hanya

[108] Affantino, Peserta Sekolah Demokrasi, diwawancarai oleh penulis, Jember 13 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> kegiatan lima tahunan biasa, tetapi ternyata dampaknya cukup besar terhadap masyarakat."[109]

Pernyataan Jefri mengonfirmasi adanya peralihan dari pandangan pasif ke pandangan yang lebih kritis dan partisipatif. la kini memahami bahwa setiap suara memiliki bobot dan konsekuensi nyata bagi kehidupan masyarakat. Pengetahuan ini bukan sekadar informasi faktual, melainkan merupakan fondasi bagi terbentuknya rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis.

Sementara itu, Mahsa memberikan keterangan yang menegaskan bahwa program ini berhasil mematangkan pengetahuan yang sebelumnya ia miliki hanya secara parsial:

> "Nah kalau saya sendiri melalui kegiatan sosialisasi itu ya, saya jadi kembali lagi mengetahui banyak hal yang belum saya ketahui sebelumnya. Karena kan dulu di jenjang sebelumnya tidak dijelaskan tentang apa itu hak pilih atau tentang demokrasi. Dijelaskan tapi hanya dasar-dasamya aja kan. Nah kalau ini mungkin lebih mematangkan gimana kita nantinya kalau memilih seperti itu. Kalau misalnya nanti kita sudah memiliki hak suara untuk dalam pemilunya itu kita sudah matang dan bisa berpikir secara kritis."[110]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keterangan Mahsa memperjelas sebuah fakta penting bahwa kurikulum pendidikan formal yang ada belum mampu memberikan pemahaman demokrasi yang memadai bagi generasi muda. Program Sekolah Demokrasi hadir mengisi celah tersebut dengan menyajikan materi yang lebih mendalam, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan pemilih pemula. Tidak hanya berhenti pada fakta-fakta

[109] Jefri, Peserta Sekolah Demokrasi, diwawancarai oleh penulis, Jember 13 Mei 2026.
[110] Mahsa, Peserta Sekolah Demokrasi, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Mei 2026.

teknis kepemiluan, materi program juga menyentuh dimensi filosofis demokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Andi Wasis:

> ”Materinya ya soal filsafat Renaissance, termasuk Plato, Aristoteles itu kan masuk dalam filsafat Renaissance. Selain itu materi wajib yang juga kita sampaikan adalah penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, khususnya di Indonesia. Bagaimana penyelenggaraan pemilu itu jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang juga menganut sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin di masing-masing negara.”[111]

Cakupan materi yang menggabungkan filsafat demokrasi, komparasi sistem pemilu antarnegara, serta tata kelola kepemiluan di Indonesia menjadikan program ini lebih dari sekadar sosialisasi teknis. Program ini memberikan kerangka berpikir yang komprehensif kepada pemilih pemula, sehingga mereka tidak hanya tahu bagaimana cara memilih, tetapi juga memahami mengapa berpartisipasi dalam pemilu merupakan sebuah tanggung jawab moral dan konstitusional. Dengan demikian, pada aspek kognitif, program Sekolah Demokrasi menunjukkan efektivitas yang nyata dan terukur melalui pengakuan langsung dari para peserta.

b. Peningkatan Kesadaran Terhadap Hak Pilih

Aspek afektif dari kesadaran politik berkaitan dengan sikap, kepedulian, dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap proses demokrasi. Dalam konteks penelitian ini, indikator afektif diukur dari sejauh mana peserta merasakan perubahan sikap terhadap hak pilih

[111] Andi Wasis, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mereka sebagai warga negara setelah mengikuti program Sekolah Demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh peserta secara konsisten menyatakan bahwa program ini telah mendorong tumbuhnya kesadaran yang lebih dalam mengenai nilai dan tanggung jawab yang melekat pada hak pilih. Affantino mengungkapkan adanya perubahan sikap yang signifikan terhadap hak pilih:

> ”Iya, saya jadi lebih sadar bahwa hak pilih tidak boleh disia-siakan. Kalau generasi muda tidak ikut memilih, nanti keputusan hanya ditentukan oleh orang lain. Jadi saya merasa pemilih pemula juga punya tanggung jawab terhadap masa depan negara.”[112]

Pernyataan tersebut mencerminkan tumbuhnya rasa tanggung jawab kolektif pada diri peserta. Affantino tidak hanya menyadari hak pilihnya sebagai urusan pribadi, tetapi juga memahami konsekuensi sosialnya apabila generasi muda secara massal memilih untuk tidak berpartisipasi. Kesadaran seperti ini merupakan cerminan dari kematangan sikap politik yang menjadi salah satu tujuan utama program Sekolah Demokrasi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jefri yang menyatakan adanya perubahan orientasi sikap:

> ”Menurut saya iya, karena setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi memahami bahwa hak pilih merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam demokrasi. Saya juga jadi lebih tertarik untuk ikut memilih ketika nanti sudah mempunyai hak pilih.”[113]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112] Affantino, diwawancarai oleh penulis, 13 Mei 2026.
[113] Jefri, diwawancarai oleh penulis, 13 Mei 2026.

Keterangan Jefri menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sikap acuh menjadi ketertarikan yang aktif untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini mengindikasikan bahwa program berhasil menanamkan motivasi intrinsik pada diri peserta untuk menggunakan hak pilihnya kelak, bukan karena paksaan atau mobilisasi, melainkan atas dasar pemahaman yang tulus mengenai makna dan fungsi demokrasi.

Sementara itu, Anindya dan Mahsa secara bersama-sama menegaskan pentingnya partisipasi setiap suara dalam proses demokrasi, termasuk dalam konteks tanggung jawab mereka sebagai generasi penerus bangsa:

> ”Kalau kita, iya. Karena semua suara dari rakyat itu kan penting ya, pasti diperlukan agar tidak disalahgunakan datanya ataupun bisa turut serta dalam demokrasi di negara. Apalagi kita sebagai calon masa depan ya, calon generasi emas, pasti pentinglah.”[114]

Ungkapan 'calon generasi emas' yang digunakan oleh Anindya dan Mahsa bukan sekadar retorika. Frasa tersebut menandakan tumbuhnya identitas politik pada diri peserta sebagai generasi yang memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Kesadaran akan identitas ini merupakan bagian penting dari aspek afektif dalam pembentukan warga negara yang demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Anindya dan Mahsa, diwawancarai oleh penulis, 18 Mei 2026.

Lebih jauh, Anindya juga menyatakan bahwa program ini telah mendorongnya untuk merasakan secara langsung dampak dari hak pilihnya:

> ”Lumayan sih karena ya kembali lagi, kita jadi sadar gimana impact-nya hak pilih kita terhadap kegiatan ini.”[115]

Data-data tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa program Sekolah Demokrasi tidak hanya berhasil memberikan pengetahuan secara kognitif, tetapi juga mampu menyentuh dimensi afektif peserta. Tumbuhnya kesadaran bahwa hak pilih adalah amanah yang tidak boleh diabaikan merupakan indikasi yang kuat bahwa program ini efektif dalam membentuk sikap politik yang lebih bertanggung jawab pada diri pemilih pemula.

c. Peningkatan Kepedulian Terhadap Isu Politik dan Demokrasi

Dimensi ketiga yang menjadi indikator efektivitas program adalah meningkatnya kepedulian peserta terhadap isu-isu politik dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kepedulian ini mencerminkan keberhasilan program dalam melampaui sekadar transfer pengetahuan, menuju pembentukan habitus atau kebiasaan berpikir yang lebih peka terhadap dinamika politik di lingkungan sekitar peserta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[115] Anindya, Peserta Sekolah Demokrasi, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Mei 2026.

Affantino menyatakan bahwa setelah mengikuti Sekolah Demokrasi, ia mulai aktif mengikuti perkembangan berita-berita seputar politik dan pemilu secara mandiri:

> ”Menurut saya iya, karena sekarang saya jadi lebih sering mengikuti berita tentang pemilu dan politik di media sosial. Saya juga mulai memahami bahwa politik itu sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.”[116]

Pernyataan Affantino mengindikasikan adanya perubahan perilaku konsumsi informasi yang lebih aktif dan kritis pasca program. Ia tidak lagi memandang politik sebagai sesuatu yang jauh dan tidak relevan, melainkan mulai memahami bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin terpilih berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kesadaran inilah yang kemudian mendorongnya untuk terus mencari informasi dan memperbarui pemahamannya tentang dinamika politik yang sedang berlangsung.

Selain meningkatnya keaktifan dalam mengonsumsi informasi, program ini juga mendorong peserta untuk bersikap lebih selektif dan kritis terhadap informasi yang mereka terima. Jefri mengungkapkan:

> ”Cukup membuat saya lebih peduli, terutama tentang informasi pemilu dan demokrasi di lingkungan sekitar. Saya juga menjadi lebih berhati-hati dalam menerima berita politik di internet karena sekarang banyak informasi yang belum tentu benar.”[117]

[116] Affantino, diwawancarai oleh penulis, 13 Mei 2026.
[117] Jefri, diwawancarai oleh penulis, 13 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hal ini merupakan dampak yang sangat signifikan dari program pendidikan politik. Di era informasi yang diwarnai oleh maraknya berita bohong (hoaks) dan disinformasi politik, kemampuan untuk berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi adalah kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh pemilih pemula. Kenyataan bahwa Jefri mulai berhati-hati dalam menerima berita politik menunjukkan bahwa program berhasil menanamkan nilai literasi digital yang relevan.

Kepedulian serupa juga ditunjukkan oleh Anindya yang kini memahami bahwa isu politik tidak berjarak dari kehidupan nyata mereka:

> ”Iya, karena di sana diajarkan tentang isu politik dan hak pilih dari masyarakat itu sendiri. Jadi nantinya kalau sudah ada hak suara yang sah, kita bisa memilih dengan tepat.”[118]

Mahsa bahkan mengungkapkan bahwa program ini mendorongnya untuk melakukan literasi politik secara mandiri jauh sebelum pemilu digelar, sebagai bentuk persiapan agar dapat berpartisipasi dengan bijak:

> ”iyaa, biar tidak salah juga dalam memilih, kita bisa sebelum adanya pemilu kita jadi banyak literasi terlebih dahulu tentang calon-calonnya, sehingga tidak terjadi salah memilih ataupun bahkan tidak memilih.”[119]

Mahsa menunjukkan lahirnya inisiatif personal yang tidak diperintahkan oleh siapa pun. la secara sadar memutuskan untuk mempersiapkan diri sebagai pemilih yang cerdas dengan melakukan

[118] Anindya, diwawancarai oleh penulis, 18 Mei 2026.
[119] Mahsa, diwawancarai oleh penulis, 18 Mei 2026.

riset mandiri terhadap calon-calon yang akan dipilih. Inisiatif seperti ini merupakan salah satu output paling ideal dari sebuah program pendidikan politik yang berhasil.

Secara keseluruhan, data dari aspek ini menunjukkan bahwa program Sekolah Demokrasi berhasil menumbuhkan sensitivitas dan kepedulian politik yang otentik pada diri peserta. Mereka tidak lagi memandang politik sebagai arena yang jauh, kompleks, dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka mulai aktif mencari informasi, berpikir kritis terhadap isu-isu demokrasi, dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi secara cerdas dalam pemilu yang akan datang.

d. Keaktifan dan Antusisasme Peserta sebagai Indikator Evektivitas Program

Efektivitas sebuah program pendidikan politik tidak hanya dapat diukur dari perubahan yang terjadi pada diri peserta pasca program, tetapi juga dari dinamika proses pelaksanaan program itu sendiri. Salah satu indikator yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember dalam menilai keberhasilan Sekolah Demokrasi adalah tingkat keaktifan dan antusiasme peserta selama program berlangsung.

Andi Wasis memaparkan bahwa sesi diskusi dalam program tersebut berlangsung sangat dinamis dan partisipatif, bahkan melampaui ekspektasi awal pihak penyelenggara:

> ”Peserta sangat aktif ya, sangat aktif dalam sesi diskusi. Jadi selain pemaparan materi dari narasumber, kita juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> memberikan sesi waktu untuk tanya jawab. Hampir semua peserta aktif dalam diskusi yang kami selenggarakan. Artinya apa artinya mereka ternyata juga kalau dianggap apatis ya tidak juga, ya mungkin memang pesertanya kita pilih temen temen yang organisasi, yang memiliki latar belakang yang aktif di dunia organisasi, sehingga mereka kita harapkan bisa menjadi pelopor terkait dengan demokrasi yang kita harapkan, dan kita dorong terus kepada generasi muda. Jadi kita berharapnya mereka mau menjadi pelopor, menjadi virus, untuk generasi pemuda-pemuda yang mungkin saja tidak aktif di organisasi OSIS maupun organisasi mahasiswa."[120]

Tingkat keaktifan peserta ini menjadi bukti lapangan yang sangat penting. Program berhasil menciptakan ruang pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif, bukan sekadar kehadiran pasif. Peserta tidak hanya menerima materi secara searah, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir kritis dan berdialog mengenai isu-isu demokrasi secara langsung. Keberhasilan menciptakan dinamika diskusi yang produktif ini mengindikasikan bahwa materi yang disajikan berhasil membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat intelektual peserta.

Dari sisi kuantitas kehadiran, Andryzha Caprio mencatat bahwa seluruh sekolah yang diundang hadir tanpa terkecuali, sebuah capaian yang sangat berarti di tengah keterbatasan fasilitas yang dapat disediakan penyelenggara:

> "Dari 10 sekolah yang kita undang, semuanya hadir. Dan semuanya pengurus OSIS, dan rata-rata ketua dan sekretarisnya karena kita undang tiga orang ya. Artinya menunjukkan usaha kami, upaya kami dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih itu disambut baik oleh pihak-pihak yang kami undang, terutama pihak-pihak dari sekolah-sekolah yang kami undang itu."[121]

[120] Andi Wasis, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.
[121] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kehadiran 100% dari sekolah yang diundang merupakan sinyal positif yang menunjukkan bahwa program ini mendapat sambutan dan apresiasi dari komunitas pendidikan di Kabupaten Jember. Dalam konteks keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang memaksakan format pengundangan peserta ke kantor KPU tanpa fasilitas transport dan uang saku tingginya kehadiran ini semakin memperkuat penilaian bahwa program tersebut dianggap memiliki nilai dan manfaat yang nyata bagi peserta dan sekolah masing-masing.

Andryzha Caprio juga menambahkan harapan yang lebih luas terkait dampak program terhadap kehidupan demokratis peserta di lingkungan mereka masing-masing, termasuk dalam kegiatan-kegiatan berorganisasi di sekolah:

> ”Tentunya harapannya mereka juga antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena mereka mungkin menganggap kegiatan ini juga punya manfaat ya sebagai literatur kepemiluan dan harapannya bisa diterapkan di sekolah. Salah satunya mungkin pemilihan Ketua OSIS, bahkan lingkup paling kecilnya bagaim memilih Ketua Kelas dengan sistem demokrasi secara langsung.”[122]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember tidak hanya berorientasi pada dampak jangka pendek berupa pengetahuan teknis kepemiluan, tetapi juga menginginkan dampak jangka panjang berupa perubahan budaya demokrasi di tingkat sekolah dan komunitas. Program Sekolah Demokrasi diharapkan

[122] Andryzha Caprio, diwawancarai oleh penulis, 12 Mei 2026.

menjadi benih yang tumbuh dan berkembang dalam ekosistem sosial para pesertanya, bahkan hingga ke tataran paling mikro seperti pemilihan ketua kelas.

e. Evaluasi Peserta Terhadap Kelebihan dan Kekurangan Program

Untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan berimbang mengenai efektivitas program, peneliti menggali penilaian kritis dari para peserta mengenai kelebihan maupun kekurangan yang mereka rasakan selama mengikuti Sekolah Demokrasi, Penilaian ini penting karena memberikan perspektif dari sudut pandang sasaran program secara langsung.

Secara umum, seluruh peserta menilai bahwa program ini memiliki kelebihan yang substansial, terutama dalam hal kebaruan dan relevansi materi. Affantino menyampaikan:

> ”Kelebihannya, materi yang diberikan cukup mudah dipahami oleh pelajar dan penyampaiannya tidak membosankan. Kekurangannya mungkin waktu kegiatan terlalu singkat, jadi masih ada beberapa materi yang belum dijelaskan lebih mendalam.”[123]

Penilaian Affantino memberikan dua informasi penting sekaligus. Di satu sisi, penyampaian materi dinilai mudah dipahami dan tidak membosankan, yang menunjukkan bahwa narasumber mampu mengemas materi dengan cara yang accessible bagi kalangan pelajar. Di sisi lain, keterbatasan waktu menjadi kendala tersendiri sehingga beberapa materi belum dapat dibahas secara mendalam. Hal

[123] Affantino, diwawancarai oleh penulis, 13 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya terdapat minat dan kebutuhan yang lebih besar dari peserta untuk mengeksplorasi topik-topik yang dibahas.

Jefri menambahkan dimensi lain dari kelebihan program, yakni ketersediaan ruang diskusi yang interaktif, sembari mengidentifikasi kekurangan yang berkaitan dengan jangkauan program yang masih terbatas:

> "Kelebihannya adalah kegiatan ini memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya jarang didapatkan di sekolah. Selain itu suasana diskusinya juga cukup interaktif. Kekurangannya mungkin kegiatan seperti ini belum dilakukan secara rutin sehingga masih banyak pelajar lain yang belum mendapatkan pendidikan politik seperti ini."[124]

Catatan Jefri mengenai jangkauan program yang masih sempit ini relevan untuk diperhatikan. Dengan hanya mengundang 30 orang peserta dari 10 sekolah, program ini baru menjangkau sebagian sangat kecil dari total pemilih pemula di Kabupaten Jember. Sementara kebutuhan akan pendidikan politik semacam ini sesungguhnya jauh lebih luas dan merata di kalangan generasi muda.

Anindya menyoroti aspek peningkatan literasi demokrasi sebagai kelebihan utama yang ia rasakan dari program ini:

> "Kelebihannya yang satu tadi kita jadi lebih melek terhadap pemilu, demokrasi, juga kita jadi lebih paham dasar-dasar gimana sih cara bekerjanya pemilu ini."[125]

[124] Jefri, diwawancarai oleh penulis, 13 Mei 2026.
[125] Anindya, diwawancarai oleh penulis, 18 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Adapun Mahsa memberikan penilaian yang lebih rinci dengan menyertakan catatan spesifik mengenai aspek atmosfer acara yang dinilai perlu diperbaiki:

> ”Kalau dari kekurangan sebenarnya untuk materi dan cakupan pengetahuannya itu sudah sangat menarik dan sangat memberikan dampak yang baik untuk kita, tapi kekurangannya itu terletak pada suasana acara aja. Seperti yang kurang interaktif, jadi untuk siswa itu kadang merasa sering ngantuk atau sering apa ya, kayak bosanlah. Meskipun materinya tuh cukup menarik buat kita karena kita sebelumnya nggak tahu, tapi suasana dari narasumber mungkin kurang interaktif, dan bagaimana narasumber membawakan atmosfer di acara tersebut, utamanya terlalu formal mungkin, terletak di situ.”[126]

Catatan Mahsa ini sangat berharga sebagai masukan konstruktif. Materi yang secara substansial sudah sangat baik ternyata tidak sepenuhnya tersampaikan secara optimal karena gaya penyampaian narasumber yang terlalu formal dan kurang interaktif bagi khalayak pelajar SMA. Ini menunjukkan bahwa efektivitas sebuah program pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas konten, tetapi juga oleh metode dan pendekatan penyampaian yang sesuai dengan karakteristik audiens.

Dari seluruh penilaian peserta tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Sekolah Demokrasi memiliki kekuatan utama pada konten materi yang relevan, baru, dan komprehensif. Namun demikian, terdapat catatan penting yang perlu ditindaklanjuti, antara lain: alokasi waktu yang perlu diperpanjang, gaya penyampaian yang lebih perlu disesuaikan dengan karakter peserta dari kalangan pelajar,

[126] Mahsa, diwawancarai oleh penulis, 18 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta jangkauan program yang perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pemilih pemula di Kabupaten Jember.

Berdasarkan seluruh data yang telah dipaparkan di atas melalui wawancara mendalam dengan penyelenggara dan peserta program, dapat disimpulkan bahwa Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember secara umum efektif dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula, meskipun dengan sejumlah catatan dan keterbatasan yang perlu mendapat perhatian serius untuk penyempurnaan ke depan.

Efektivitas program ini termanifestasi pada tiga dimensi utama. Pertama, pada aspek kognitif, peserta mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai demokrasi, kepemiluan, dan hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara, dengan pergeseran perspektif dari pandangan pasif ke pemahaman yang lebih kritis dan mendalam. Kedua, pada aspek afektif, peserta menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif, bertanggung jawab, dan termotivasi dalam menggunakan hak pilih serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi secara keseluruhan. Ketiga, pada aspek kepedulian terhadap isu-isu politik, peserta mulai menunjukkan perilaku yang lebih aktif dalam mengonsumsi dan memilah informasi politik secara kritis, bahkan mendorong inisiatif literasi politik secara mandiri sebelum pemilu berlangsung.

Di sisi lain, program ini juga menghadapi sejumlah keterbatasan yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

alokasi waktu yang dinilai terlalu singkat untuk cakupan materi yang sangat luas, gaya penyampaian narasumber yang masih terlalu formal bagi kalangan pelajar sehingga berpotensi mengurangi daya serap peserta, keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya fasilitas penunjang, serta jangkauan program yang belum merata karena baru menjangkau sebagian kecil dari total pemilih pemula di Kabupaten Jember. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak serta-merta mengurangi nilai dan efektivitas program yang telah berjalan, melainkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif demi peningkatan kualitas dan jangkauan program pada penyelenggaraan berikutnya.

3. Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Program Sekolah Demokrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Jember

Fokus penelitian ketiga ini bertujuan menganalisis Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dari sudut pandang fikih siyasah dusturiyah. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan politik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola negara, khususnya prinsip syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), 'adl (keadilan), dan maslahah (kemanfaatan). Data yang disajikan dalam subbab ini merupakan hasil wawancara mendalam dengan Komisioner KPU Kabupaten Jember, staf pelaksana, dan peserta program, yang kemudian disandingkan dengan dalil-dalil normatif fikih siyasah untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menggambarkan kesesuaian antara program dan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan.

a. Kedudukan Fikih Siyasah Dusturiyah dalam Menganalisis Program Pendidikan Politik

Fikih siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fikih siyasah yang membahas tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat, pengelolaan kekuasaan, serta kebijakan negara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dalam konteks negara modern, siyasah dusturiyah tidak hanya berkaitan dengan sistem pemerintahan, tetapi juga mencakup kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga negara demi kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan publik tersebut adalah pendidikan politik yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Menurut J. Suyuthi Pulungan, fikih siyasah dusturiyah menempatkan negara sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat melalui prinsip-prinsip syariat Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.[127] Oleh karena itu, kebijakan negara yang bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi dan kesadaran politik masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam perspektif siyasah dusturiyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[127] Pulungan, *Fikih Siyasah*, 25-27.

Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai pemilu dan demokrasi, tetapi juga membentuk sikap politik yang bertanggung jawab bagi generasi muda. Dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah, program tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan amanah negara untuk membimbing masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran paling baik. kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58).[128]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara amanah dan adil, termasuk dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, KPU Kabupaten Jember sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemilu secara teknis, tetapi juga memiliki

[128] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa ayat 58.

kewajiban moral dan konstitusional untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik.

Selain itu, J. Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa dalam siyasah dusturiyah, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun atas dasar kemaslahatan umum.[129] Kebijakan yang dibuat pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta kepentingan rakyat. Dengan demikian, program Sekolah Demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan publik yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sadar politik, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam pelaksanaan program Sekolah Demokrasi di Kabupaten Jember, materi yang diberikan kepada peserta meliputi pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, hak dan kewajiban warga negara, bahaya politik uang, pentingnya partisipasi politik, serta etika berdemokrasi. Materi tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan preventif terhadap praktik-praktik politik yang bertentangan dengan nilai demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Jember, program Sekolah Demokrasi dilaksanakan sebagai bentuk pendidikan politik bagi generasi muda agar mereka tidak menjadi pemilih yang apatis maupun mudah dipengaruhi oleh politik

[129] Pulungan, *Fikih Siyasah*, 30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

transaksional. KPU menilai bahwa pemilih pemula memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang sehingga perlu diberikan pemahaman politik sejak dini.

Dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah, upaya tersebut termasuk bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas kehidupan politik masyarakat. Negara tidak hanya bertugas mengatur administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki kewajiban membentuk masyarakat yang sadar hukum, sadar politik, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, fikih siyasah dusturiyah dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif normatif untuk menilai kesesuaian Program Sekolah Demokrasi dengan prinsip-prinsip politik Islam. Adapun prinsip yang menjadi acuan meliputi syura, amanah, keadilan, serta kemaslahatan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

b. Program Sekolah Demokrasi dalam Perspektif Prinsip Syura (Musyawarah)

Prinsip syura merupakan salah satu konsep penting dalam fikih siyasah yang menekankan pentingnya proses musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif Islam, musyawarah dipahami sebagai mekanisme yang memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses sosial maupun politik.

Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنُهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: ”juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38).[130]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dilaksanakan melalui partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi modern, prinsip syura memiliki relevansi dengan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pemilu maupun kehidupan demokrasi secara umum.

Menurut J. Suyuthi Pulungan, syura merupakan prinsip dasar dalam pemerintahan Islam yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses kebijakan publik.[131] Oleh karena itu, pendidikan politik yang mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dapat dipahami sebagai implementasi nilai syura dalam konteks negara modern.

Program Sekolah Demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jember memiliki keterkaitan erat dengan prinsip syura karena program tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih pemula. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan ruang untuk berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, serta memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[130] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Asy-Syura ayat 38.
[131] Pulungan, *Fikih Siyasah*, 72-74.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kegiatan Sekolah Demokrasi tidak hanya dilakukan melalui metode ceramah, tetapi juga menggunakan pendekatan diskusi interaktif dan simulasi kepemiluan. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai demokrasi, pemilu, dan permasalahan politik yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya membangun budaya dialog dan partisipasi politik di kalangan generasi muda.

Dalam perspektif fikih siyasah, keterlibatan masyarakat dalam proses politik merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara. Musyawarah tidak hanya dimaknai sebagai proses formal pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Program Sekolah Demokrasi juga memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan demokrasi. Nilai tersebut sejalan dengan prinsip syura yang mengedepankan dialog dan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dengan demikian, program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip syura dalam konteks pendidikan politik modern karena program tersebut mendorong partisipasi, dialog, dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Program Sekolah Demokrasi dalam Perspektif Prinsip Amanah (Tanggung Jawab)

Prinsip amanah dalam fikih siyasah dusturiyah menempatkan kekuasaan dan jabatan publik sebagai titipan (amanah) yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. Seorang pemimpin atau penyelenggara negara tidak boleh memandang jabatannya sebagai hak istimewa pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya-baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.

Allah SWT berfirman mengenai prinsip amanah dalam QS. An-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran paling baik. kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58).[132]

Menurut J. Suyuthi Pulungan, amanah dalam siyasah berarti tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan tugas demi kepentingan rakyat dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.[133] Dalam konteks negara modern, prinsip amanah berkaitan

[132] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa ayat 58.
[133] Pulungan, *Fikih Siyasah*, 85.

dengan tanggung jawab lembaga negara dalam memberikan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Program Sekolah Demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan amanah oleh KPU Kabupaten Jember dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. KPU tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui edukasi kepada pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Jember, pelaksanaan Sekolah Demokrasi dilakukan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam membangun pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Program tersebut dirancang agar pemilih pemula memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara sadar dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang maupun informasi hoaks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif fikih siyasah, upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat. Pendidikan politik tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran serta etika politik masyarakat.

Selain itu, peserta Sekolah Demokrasi juga diberikan pemahaman mengenai tanggung jawab warga negara dalam menjaga

demokrasi. Para peserta diberikan pemahaman bahwa penggunaan hak pilih tidak hanya merupakan hak politik, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara.

Prinsip amanah juga tercermin dalam materi mengenai etika politik dan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program Sekolah Demokrasi tidak sekadar berfokus pada aspek teknis, tetapi juga turut membentuk kesadaran moral dan etika politik peserta.

Dengan demikian, program Sekolah Demokrasi dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah mencerminkan implementasi prinsip amanah karena program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab KPU Kabupaten Jember dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat demi terciptanya demokrasi yang berkualitas.

d. Program Sekolah Demokrasi dalam Perspektif Prinsip 'Adl (Keadilan)

Prinsip 'adl atau keadilan merupakan prinsip fundamental dalam fikih siyasah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Islam menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Allah SWT memerintahkan keadilan dalam QS. An-Nahl: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَايْتَانِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat". (QS. An-Nahl: 90).[134]

Menurut J. Suyuthi Pulungan, keadilan dalam siyasah berarti memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa diskriminasi.[135] Pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam kehidupan sosial maupun politik.

Program Sekolah Demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jember menunjukkan adanya upaya mewujudkan keadilan dalam pendidikan politik. Program tersebut terbuka bagi generasi muda dan pemilih pemula tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan peserta.

Berdasarkan hasil penelitian, peserta Sekolah Demokrasi berasal dari berbagai sekolah dan latar belakang yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember berupaya memberikan akses pendidikan politik secara merata kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, materi yang diberikan kepada peserta juga menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Peserta diberikan pemahaman mengenai bahaya politik uang, manipulasi suara, dan praktik-praktik yang merusak demokrasi.

Dalam perspektif fikih siyasah, keadilan dalam kehidupan politik tidak hanya diukur dari hasil pemilu, tetapi juga mencakup proses pendidikan politik kepada masyarakat. Negara berkewajiban

[134] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nahl ayat 90.
[135] Pulungan, *Fikih Siyasah,* 96-98.

menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk memahami demokrasi serta menggunakan hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab.

Program Sekolah Demokrasi juga memberikan ruang yang sama kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi mengenai persoalan demokrasi. Hal tersebut mencerminkan nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak politik masyarakat.

Dengan demikian, program Sekolah Demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip 'adl dalam fikih siyasah karena program tersebut berupaya memberikan pendidikan politik secara merata dan adil kepada pemilih pemula di Kabupaten Jember.

e. Program Sekolah Demokrasi dalam Perspektif Prinsip Maslahah (Kemanfaatan)

Prinsip maslahah merupakan salah satu prinsip utama dalam fikih siyasah yang menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. A. Djazuli menjelaskan bahwa dalam kaidah fikih terdapat prinsip:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: ”Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”[136]

[136] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), 147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa seluruh kebijakan negara harus diarahkan untuk menciptakan manfaat dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, program Sekolah Demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi dan kesadaran politik masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, program Sekolah Demokrasi memberikan manfaat bagi peserta dalam meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi, pemilu, hak politik, dan pentingnya partisipasi politik. Peserta menjadi lebih memahami proses pemilu serta pentingnya memilih pemimpin secara sadar dan bertanggung jawab.

Selain itu, program ini juga memberikan manfaat dalam membangun sikap kritis peserta terhadap praktik politik yang menyimpang seperti politik uang dan penyebaran informasi palsu. Dengan adanya pendidikan politik tersebut, peserta menjadi lebih selektif dalam menerima informasi politik dan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi.

Program Sekolah Demokrasi juga memiliki manfaat jangka panjang dalam membentuk budaya demokrasi di kalangan generasi muda. Pemilih pemula yang memiliki pemahaman politik yang baik diharapkan mampu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember sejalan dengan prinsip maslahah dalam fikih siyasah dusturiyah karena program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula dan memperkuat kualitas demokrasi.

Tabel 4.1
Temuan Hasil Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Temuan	Kesimpulan
1.	Pelaksanaan Program Sekolah demokrasi	Program dilaksanakan pada 30 September 2025 di kantor KPU Kabupaten Jember dengan tema "Membangun Kesadaran Demokrasi Generasi Muda". Program ini didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 448-449 dan PKPU No. 9 Tahun 2022. Kegiatan diikuti sekitar 30 siswa dari 10 SMA di Kabupaten Jember, khususnya pengurus OSIS, dengan tingkat kehadiran mencapai 100%. Materi yang diberikan meliputi: (1) Demokrasi di Indonesia dan Kepartaian, (2) Proyeksi dan Tantangan Demokrasi, dan (3) Sistem serta Tata Kelola Kepemiluan. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Dr. Eko Suwargono, M.Hum. dan Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA. Metode yang digunakan berupa ceramah dan diskusi interaktif. Kendala utama	Program Sekolah Demokrasi terlaksana atas dasar mandat hukum sekaligus kebutuhan empiris untuk meningkatkan pendidikan politik generasi muda. Strategi multiplier effect diterapkan melalui pemilihan siswa aktif organisasi sebagai agen penyebaran nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.

		dalam pelaksanaan program yaitu keterbatasan narasumber yang kompeten di bidang filsafat demokrasi serta keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.	
2.	Efektivitas Program dalam Meningkatkan Kesadaran Politik	➢ Aspek Kognitif Seluruh informan mengalami peningkatan pengetahuan politik yang signifikan setelah mengikuti program. Setelah mengikuti program, terjadi peningkatan pengetahuan politik yang signifikan pada generasi muda yang terlibat. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian besar masih memandang pemilu sebatas kegiatan rutin lima tahunan dan belum memahami fungsi substantif pemilu dalam menentukan arah pembangunan negara. Namun setelah mengikuti program, muncul pemahaman bahwa setiap suara memiliki dampak nyata terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, materi yang diberikan dinilai lebih mendalam dibandingkan pembelajaran formal di sekolah karena tidak hanya membahas konsep dasar demokrasi, tetapi juga menjelaskan sistem pemilu dan tata kelola kepemiluan secara lebih komprehensif. ➢ Aspek Afektif	Program Sekolah Demokrasi KPU Kabupaten Jember terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman politik generasi muda (aspek kognitif), terbentuknya sikap positif terhadap partisipasi politik (aspek afektif), serta meningkatnya kepedulian dan kemampuan kritis terhadap informasi politik (aspek kepedulian). Program tidak hanya memberikan pengetahuan politik, tetapi juga mendorong lahirnya kesadaran dan partisipasi politik yang lebih aktif dan bertanggung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Terjadi perubahan sikap positif pada seluruh menimbulkan perubahan sikap positif dalam diri generasi muda. Setelah mengikuti kegiatan, muncul kesadaran bahwa hak pilih merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi informan setelah mengikuti program. Program juga sehingga tidak boleh disia-siakan. Sikap yang sebelumnya cenderung apatis berubah menjadi keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu atas dasar kesadaran pribadi. Selain itu, generasi muda mulai memandang diri mereka sebagai bagian penting yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia. ➢ Aspek Kepedulian Setelah mengikuti program, generasi muda menjadi lebih aktif mengikuti perkembangan politik melalui media sosial dan mulai memahami bahwa politik memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, muncul sikap yang lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi politik serta meningkatnya kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks.	jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Program juga mendorong lahirnya inisiatif mandiri dalam melakukan literasi politik, seperti mencari informasi dan melakukan riset mengenai calon pemimpin sebelum pemilu berlangsung.	
3.	Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah	Program Sekolah Demokrasi selaras dengan prinsip-prinsip fikih siyasah dusturiyah, yaitu: (1) Syura berdasarkan QS. Asy-Syura ayat 38 yang tercermin dalam metode diskusi interaktif dan partisipatif; (2) Amanah berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 58 yang terlihat dari tanggung jawab KPU dalam melaksanakan pendidikan politik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran; (3) 'Adl berdasarkan QS. An-Nahl ayat 90 yang tercermin melalui keterbukaan program bagi siswa dari berbagai latar belakang serta penekanan terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil; dan (4) Maslahah yang tampak dari manfaat nyata program dalam meningkatkan kesadaran politik dan membangun budaya demokrasi jangka panjang.	Program Sekolah Demokrasi KPU Kabupaten Jember selaras dengan prinsip-prinsip fikih siyasah dusturiyah dan dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pendidikan politik bagi generasi muda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi yang Diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah dipaparkan, ditemukan bahwa Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember terlaksana atas dua fondasi utama, yakni mandat hukum dan kebutuhan empiris di lapangan. Secara normatif, pelaksanaan program ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum[137] serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.[138] Secara empiris, program ini lahir dari kesadaran KPU Kabupaten Jember bahwa pemilih pemula di wilayahnya membutuhkan pembekalan pengetahuan politik yang lebih mendalam dari sekadar sosialisasi teknis kepemiluan biasa.

Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi.[139] Pada variabel komunikasi, KPU Kabupaten Jember berhasil menyampaikan informasi program secara langsung kepada sepuluh sekolah menengah atas di Kabupaten Jember melalui undangan resmi, sehingga seluruh sekolah yang diundang hadir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[137] Setneg RI, UU No 7 Tahun 2017, Pasal 448 ayat (1).
[138] PKPU No. 9 Tahun 2022, Pasal 2 dan 10.
[139] George c. Edwards III, Implementing Public Policy (Wasington, D.C.: Congressional Quarterly Press), 4.

tanpa terkecuali. Capaian kehadiran 100% ini merupakan indikator konkret bahwa mekanisme komunikasi yang diterapkan oleh KPU berjalan efektif.

Pada variabel sumber daya, meskipun KPU Kabupaten Jember menghadapi kendala keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah dan sulitnya menemukan narasumber yang memiliki kompetensi khusus di bidang filsafat demokrasi, KPU tetap mampu menghadirkan dua narasumber akademisi yang kompeten, yaitu Dr. Eko Suwargono, M.Hum. dan Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA., untuk menyampaikan tiga materi utama: Demokrasi di Indonesia dan Kepartaian; Proyeksi dan Tantangan Demokrasi; serta Sistem dan Tata Kelola Kepemiluan. Ketiga materi tersebut dirancang secara holistik, menggabungkan dimensi filosofis, analitis, dan praktis dari pendidikan demokrasi.

Pada variabel disposisi pelaksana, data lapangan menunjukkan bahwa para penyelenggara program memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih, sebagaimana tercermin dari pernyataan Andryzha Caprio yang menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen KPU sebagai instrumen demokrasi yang mencerdaskan pemilih, bukan sekadar kewajiban regulatif formal. Adapun pada variabel struktur organisasi, pelaksanaan program secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih, yang memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam merancang dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih.[140] Pembagian tugas yang jelas ini mendukung terlaksananya program secara tertib dan terkoordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Program Sekolah Demokrasi di KPU Kabupaten Jember berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut menunjukkan proses bagaimana program mampu meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula.

1. Pemberian materi pendidikan politik.

   Pada tahap ini peserta memperoleh materi mengenai demokrasi, kepemiluan, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik. Penyampaian materi dilakukan oleh narasumber dari KPU Kabupaten Jember melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Tahap ini menjadi dasar dalam membangun pengetahuan politik peserta.

2. Internalisasi nilai-nilai demokrasi.

   Setelah memperoleh materi, peserta mulai memahami pentingnya hak pilih, tanggung jawab sebagai warga negara, serta arti penting demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahap ini terjadi perubahan cara pandang dan sikap peserta terhadap pemilu dan partisipasi politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[140] Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik*, 4.

3. Tumbuhnya kepedulian politik.

   Pemahaman dan sikap yang telah terbentuk kemudian mendorong peserta untuk lebih peduli terhadap perkembangan politik. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya perhatian peserta terhadap informasi politik, keinginan mengikuti perkembangan pemilu, serta kemampuan menyaring informasi politik secara kritis.

4. Penerapan dalam perilaku nyata.

   Tahap akhir ditunjukkan melalui implementasi hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Peserta mulai melakukan literasi politik secara mandiri, mencari informasi mengenai calon pemimpin sebelum pemilu, berdiskusi mengenai isu politik, serta memiliki komitmen menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Tahap ini menunjukkan bahwa Program Sekolah Demokrasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku politik peserta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan pelaksanaan program ini juga relevan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa efektivitas suatu program hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan yang mengaturnya, tetapi juga oleh kesiapan fasilitas pendukung, komitmen pelaksana, dan respons masyarakat sasaran.[141] Program Sekolah Demokrasi KPU Kabupaten Jember memiliki dasar hukum yang kuat (faktor hukum), didukung oleh pelaksana yang berkomitmen (faktor

[141] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8-9.

penegak hukum), diselenggarakan dengan fasilitas yang memadai meski dalam keterbatasan anggaran (faktor sarana), serta mendapat respons positif dari peserta (faktor masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan program telah memenuhi unsur-unsur efektivitas sebagaimana yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto.

Adapun dari sisi sasaran peserta, pemilihan kelompok yang aktif berorganisasi di tingkat SMA (pengurus OSIS) dan mahasiswa mencerminkan strategi multiplikasi dampak (multiplier effect) yang dikonsepsikan oleh Ramlan Surbakti, di mana peningkatan kesadaran politik yang paling efektif dilakukan melalui agen-agen sosial yang memiliki pengaruh di komunitasnya.[142] Dengan demikian, KPU Jember secara tidak langsung membangun jaringan agen demokrasi di tingkat akar rumput yang diharapkan mampu menyebarluaskan nilai-nilai demokratis kepada generasi muda yang lebih luas.

2. Efektivitas Program Sekolah Demokrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, ditemukan adanya perubahan yang signifikan pada diri peserta setelah mengikuti Program Sekolah Demokrasi. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada peningkatan pengetahuan politik, tetapi juga pada sikap, kepedulian, serta perilaku peserta dalam kehidupan demokrasi. Untuk mempermudah

[142] Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 144.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

melihat perubahan tersebut, berikut disajikan perbandingan kondisi peserta sebelum dan sesudah mengikuti Program Sekolah Demokrasi.

Tabel 4.2
Perbandingan Pra dan Pasca Sekolah Demokrasi

Aspek	Sebelum Mengikuti Sekolah Demokrasi	Setelah Mengikuti Sekolah Demokrasi
Kognitif	Peserta hanya mengetahui pemilu sebagai kegiatan memilih pemimpin dan belum memahami fungsi strategis pemilu.	Peserta memahami bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan demokrasi yang menentukan arah kebijakan dan pembangunan negara.
Afektif	Sebagian peserta belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dan masih bersikap acuh terhadap pemilu.	Peserta memiliki kesadaran bahwa menggunakan hak pilih merupakan tanggung jawab sebagai warga negara.
Kepedulian Politik	Peserta jarang mengikuti perkembangan politik dan belum kritis terhadap informasi politik.	Peserta aktif mengikuti informasi politik, lebih selektif terhadap berita, serta memahami bahaya hoaks.
Psikomotorik	Belum terdapat tindakan nyata untuk mempersiapkan diri sebagai pemilih.	Peserta mulai melakukan literasi politik secara mandiri, mencari informasi calon, berdiskusi, dan berkomitmen menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Berdasarkan perbandingan kondisi peserta sebelum dan sesudah mengikuti Program Sekolah Demokrasi sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terlihat adanya perubahan pada berbagai aspek kesadaran politik pemilih pemula. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sekolah Demokrasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, kepedulian, serta perilaku politik peserta. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, pembahasan mengenai efektivitas program diuraikan berdasarkan masing-masing aspek kesadaran politik sebagai berikut.

a. Aspek Pengetahuan (Kognitif)

Pada dimensi kognitif, seluruh peserta yang diwawancarai menyatakan mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah mengikuti program. Affantino mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti program, ia belum memahami mengapa pemilu penting dan apa fungsinya secara substantif. Setelah mengikuti Sekolah Demokrasi, ia menyadari bahwa pemilu bukan sekadar ritual pencoblosan, melainkan merupakan instrumen penentu arah pembangunan dan kebijakan negara. Hal serupa diungkapkan peserta Jefri yang mengalami pergeseran pandangan dari menganggap pemilu sebagai kegiatan lima tahunan biasa menjadi memahami bahwa setiap suara memiliki dampak yang nyata dan signifikan bagi kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, peserta Mahsa menegaskan bahwa pendidikan demokrasi yang diperoleh di jenjang pendidikan formal sebelumnya hanya bersifat dasar dan tidak memadai. Program Sekolah Demokrasi hadir mengisi celah tersebut dengan materi yang lebih mendalam, mulai dari filsafat demokrasi klasik (Plato, Aristoteles, Montesquieu),

komparasi sistem pemilu antarnegara, hingga tata kelola kepemiluan di Indonesia. Temuan ini selaras dengan pendapat Zamroni yang menyatakan bahwa pendidikan.demokrasi harus mampu membentuk warga negara yang tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi secara substansial.[143]

Dalam konteks teori kesadaran politik Ramlan Surbakti, peningkatan pengetahuan ini merupakan indikator paling mendasar dari terbentuknya kesadaran politik.[144] Seseorang tidak dapat memiliki kesadaran politik yang memadai tanpa terlebih dahulu memahami sistem politik, hak pilih, dan fungsi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program Sekolah Demokrasi dengan materi yang komprehensif dan holistik berhasil memenuhi kebutuhan kognitif tersebut secara terukur, sebagaimana terkonfirmasi dari pengakuan langsung para peserta.

b. Aspek Sikap (Afektif)

Pada dimensi afektif, data lapangan menunjukkan adanya perubahan sikap yang positif dan signifikan pada diri peserta pasca program. Affantino yang sebelumnya mungkin belum menyadari konsekuensi dari ketidakikutsertaan generasi muda dalam pemilu, kini memahami bahwa hak pilih tidak boleh disia-siakan karena absennya pemilih muda akan menyebabkan keputusan ditentukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[143] Zamroni, *Pendidikan Demokrasi*, 15.
[144] Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 144.

oleh pihak lain semata. Kesadaran ini mencerminkan tumbuhnya rasa tanggung jawab kolektif sebagai warga negara yang demokratis.

Jefri juga menyatakan mengalami pergeseran orientasi dari sikap acuh menjadi ketertarikan yang aktif untuk berpartisipasi dalam pemilu kelak. Pergeseran ini bukan lahir dari paksaan atau mobilisasi eksternal, melainkan dari pemahaman yang tulus mengenai makna dan fungsi demokrasi yang diperoleh selama program berlangsung. Sementara Anindya dan Mahsa menegaskan bahwa suara setiap rakyat adalah penting, dan sebagai "calon generasi emas" mereka merasa memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang.

Temuan ini sangat relevan dengan indikator kesadaran politik menurut Ramlan Surbakti, khususnya indikator kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate.[145] Tumbuhnya motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam pemilu merupakan bukti konkret bahwa program Sekolah Demokrasi tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan, tetapi juga mampu menyentuh dan mengubah orientasi sikap politik peserta secara bermakna.

c. Aspek Kepedulian terhadap Isu Politik dan Demokrasi

Pada dimensi kepedulian, ditemukan bahwa program ini berhasil mendorong perubahan perilaku konsumsi informasi pada diri

[145] Fatwa, "Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat, 1618.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

peserta. Affantino menyatakan bahwa setelah mengikuti Sekolah Demokrasi, ia menjadi lebih aktif mengikuti berita politik dan pemilu di media sosial, serta mulai memahami bahwa politik sesungguhnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jefri bahkan menyatakan menjadi lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima informasi politik di internet, menyadari bahwa banyak informasi yang beredar belum tentu benar.

Di era informasi yang diwarnai maraknya hoaks dan disinformasi politik, kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi merupakan kompetensi vital bagi pemilih pemula. Temuan ini menunjukkan bahwa program Sekolah Demokrasi tidak hanya meningkatkan literasi politik, tetapi juga menanamkan literasi digital yang relevan pada diri peserta. Lebih jauh, Mahsa mengungkapkan inisiatif personal untuk melakukan literasi politik secara mandiri jauh sebelum pemilu digelar, sebagai bekal agar dapat berpartisipasi dengan cerdas dan tidak salah pilih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Inisiatif mandiri seperti ini merupakan output paling ideal dari sebuah program pendidikan politik yang berhasil. Selaras dengan indikator kesadaran politik Ramlan Surbakti mengenai kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik dan kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik. Temuan ini mengonfirmasi bahwa Program Sekolah Demokrasi telah efektif mendorong lahirnya

sensitivitas dan kepedulian politik yang otentik pada diri pemilih pemula, melampaui sekadar transfer informasi yang bersifat pasif.

d. Aspek Psikomotorik

Pada dimensi psikomotorik, Program Sekolah Demokrasi tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap politik peserta, tetapi juga mendorong munculnya tindakan nyata sebagai bentuk implementasi dari pemahaman yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara, peserta menunjukkan adanya perubahan perilaku yang mengarah pada keterlibatan aktif dalam kehidupan demokrasi.

Affantino mengungkapkan bahwa setelah mengikuti Sekolah Demokrasi dirinya menjadi lebih aktif mengikuti perkembangan berita mengenai politik dan pemilu melalui media sosial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak lagi bersikap pasif terhadap informasi politik, melainkan mulai secara sadar mencari dan memperbarui informasi yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, Jefri menyatakan bahwa dirinya menjadi lebih berhati-hati dalam menerima informasi politik yang beredar di internet. Sikap tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata berupa penyaringan informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya kepada orang lain. Perilaku ini menunjukkan adanya kemampuan peserta dalam menerapkan sikap kritis terhadap

informasi politik sebagai hasil dari proses pendidikan politik yang diperoleh selama mengikuti Program Sekolah Demokrasi.

Perubahan perilaku yang lebih nyata juga ditunjukkan oleh Mahsa. Berdasarkan hasil wawancara, peserta menyatakan akan melakukan literasi politik secara mandiri dengan mempelajari rekam jejak serta visi dan misi calon pemimpin sebelum menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Inisiatif tersebut lahir atas kesadaran pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak lain, sehingga menunjukkan bahwa peserta telah mampu menerapkan hasil pembelajaran ke dalam tindakan konkret sebagai pemilih yang bertanggung jawab.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Sekolah Demokrasi tidak berhenti pada transfer pengetahuan maupun pembentukan sikap, tetapi juga berhasil mendorong peserta untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam perilaku sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan teori ranah psikomotorik yang menekankan bahwa keberhasilan proses pembelajaran ditandai oleh kemampuan peserta menerapkan pengetahuan dan sikap ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, aspek psikomotorik dalam penelitian ini tercermin melalui meningkatnya aktivitas literasi politik, kemampuan menyaring informasi politik secara kritis, kesiapan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta keinginan peserta untuk terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Evaluasi Keaktifan dan Keterbatasan Program

Keaktifan peserta dalam sesi diskusi selama program berlangsung juga menjadi indikator penting efektivitas program. Komisioner KPU Andi Wasis menyatakan bahwa hampir seluruh peserta aktif dalam sesi tanya jawab, sebuah capaian yang melampaui ekspektasi penyelenggara. Tingkat partisipasi aktif ini menandakan bahwa program berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong peserta untuk terlibat sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif. Hal ini sejalan dengan pendekatan pendidikan demokrasi yang ditekankan Zamroni, bahwa efektivitas pendidikan demokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana peserta dapat terlibat secara aktif dan kritis dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian, Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mampu meningkatkan pemahaman pemilih pemula mengenai pentingnya pemilu, hak politik warga negara, serta partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran peserta untuk menggunakan hak pilih dan mengikuti diskusi politik secara aktif.

Temuan tersebut sejalan dengan teori demokrasi yang menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai keterlibatan aktif rakyat dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

proses politik. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai *government of the people, by the people, and for the people*, yang menunjukkan bahwa rakyat menjadi pusat dalam penyelenggaraan negara.

Dalam konteks penelitian ini, Sekolah Demokrasi menjadi sarana pendidikan politik yang mendorong pemilih pemula untuk memahami posisi mereka sebagai bagian dari rakyat yang memiliki hak menentukan arah pemerintahan melalui pemilu. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan politik, tetapi juga membentuk kesadaran demokratis peserta.

Meskipun demikian, program ini tidak luput dari sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi catatan evaluatif. Pertama, alokasi waktu yang dinilai terlalu singkat sehingga tidak semua materi dapat dibahas secara mendalam. Kedua, gaya penyampaian narasumber yang terlalu formal dinilai kurang sesuai dengan karakter peserta dari kalangan pelajar SMA, sehingga berpotensi mengurangi daya serap dan menimbulkan kejenuhan. Ketiga, jangkauan program yang masih sangat terbatas, yakni hanya menjangkau 30 orang dari 10 sekolah, jauh dari total pemilih pemula di Kabupaten Jember yang jumlahnya sangat besar. Keterbatasan-keterbatasan ini perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan program ke depan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

f. Kesadaran Hukum Pemilih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, Program Sekolah Demokrasi tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula, tetapi juga memberikan dampak terhadap tumbuhnya kesadaran hukum sebagai pemilih. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta juga menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap informasi politik yang beredar, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menyadari pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak, visi, dan misi calon. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami proses politik, tetapi juga mulai menyadari pentingnya menaati norma dan aturan hukum dalam pelaksanaan pemilu.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tercermin dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku.[146] Dalam konteks penelitian ini, peningkatan kesadaran hukum peserta terlihat melalui pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, kesadaran untuk menolak praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta komitmen untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Dengan

[146] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 152–159.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

demikian, Program Sekolah Demokrasi tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum pemilih sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan upaya KPU Kabupaten Jember dalam melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Selain melalui Program Sekolah Demokrasi, KPU Kabupaten Jember juga menyelenggarakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di UIN KHAS Jember yang menekankan pentingnya kesadaran pemilih sebagai fondasi demokrasi yang berkualitas. Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa pemilih harus mampu menggunakan hak pilih secara rasional, memahami pentingnya demokrasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh politik uang maupun informasi yang menyesatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program Sekolah Demokrasi merupakan bagian dari strategi KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda.[147]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[147] Jatim NU Online, "Prof. Haris Tekankan Pentingnya Kesadaran Pemilih Saat Sosialisasi di UIN KHAS Jember," diakses 2 Juli 2026, https://jatim.nu.or.id/pendidikan/prof-haris-tekankan-pentingnya-kesadaran-pemilih-saat-sosialisasi-di-uin-khas-jember-Oi7dy

3. Perspektif Fikih Siyasah terhadap Program Sekolah Demokrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Jember

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip fikih siyasah dusturiyah, khususnya prinsip syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), 'adl (keadilan), dan maslahah (kemanfaatan). Keempat prinsip ini secara bersamaan termanifestasi dalam berbagai aspek pelaksanaan program dan dampaknya terhadap peserta.

a. Kesesuaian dengan Prinsip Syura (Musyawarah)

Prinsip syura yang termaktub dalam QS. Asy-Syura ayat 38 menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan aktif masyarakat dalam urusan bersama. Dalam konteks penelitian ini, Program Sekolah Demokrasi mencerminkan implementasi nilai syura melalui metode diskusi interaktif yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan isu-isu demokrasi secara terbuka.[148] Keaktifan peserta dalam sesi diskusi yang dilaporkan oleh penyelenggara menunjukkan bahwa spirit syura tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi sungguh-sungguh diwujudkan dalam praktik pembelajaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[148] Pulungan, *Fikih Siyasah*, 72-74.

Lebih dari itu, program ini mendidik para peserta untuk menghargai perbedaan pendapat dan memahami pentingnya dialog dalam menyelesaikan persoalan demokrasi. Nilai ini sangat relevan dengan esensi syura yang mengedepankan keterbukaan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap setiap suara dalam proses pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, Program Sekolah Demokrasi dapat dipandang sebagai upaya internalisasi nilai syura kepada generasi muda Indonesia melalui jalur pendidikan politik.

b. Kesesuaian dengan Prinsip Amanah (Tanggung Jawab)

QS. An-Nisa' ayat 58 mengamanatkan kepada setiap pemegang kekuasaan untuk mengemban tugasnya secara bertanggung jawab dan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dalam perspektif ini, KPU Kabupaten Jember sebagai lembaga penyelenggara pemilu mengemban amanah konstitusional untuk tidak hanya melaksanakan teknis pemilu, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat, khususnya pemilih pemula, memiliki pemahaman politik yang memadai untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember telah menjalankan amanah ini dengan serius, terbukti dari dirancangnya kurikulum program yang mencakup materi filsafat demokrasi, proyeksi tantangan demokrasi, dan tata kelola kepemiluan secara komprehensif. Komitmen ini bahkan tetap terjaga di tengah

keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, di mana KPU tetap mengupayakan pelaksanaan program dengan format yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Hal ini mencerminkan nilai amanah yang sesungguhnya, yakni menjalankan tanggung jawab bukan karena kelimpahan sumber daya, melainkan karena kesadaran moral dan komitmen kelembagaan yang kuat.

c. Kesesuaian dengan Prinsip 'Adl (Keadilan)

QS. An-Nahl ayat 90 memerintahkan penegakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah mengharuskan pemerintah memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Sekolah Demokrasi diselenggarakan secara terbuka bagi pemilih pemula dari berbagai sekolah dan latar belakang yang berbeda, tanpa pembedaan berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun prestasi akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lebih substantif lagi, program ini juga mendidik peserta mengenai pentingnya pemilu yang jujur dan adil, bahaya politik uang, serta pentingnya menjaga integritas demokrasi. Peserta diberikan pemahaman bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan politik yang memadai dan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, program ini tidak hanya mempraktikkan nilai keadilan

dalam penyelenggaraannya, tetapi juga mengajarkan nilai keadilan kepada para pesertanya sebagai modal berpolitik yang bertanggung jawab.

d. Kesesuaian dengan Prinsip Maslahah (Kemanfaatan)

Kaidah fikih yang berbunyi "Tasharruful imam 'alar ra'iyah manutun bil maslahah" mengamanatkan bahwa setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.[149] Dalam konteks penelitian ini, Program Sekolah Demokrasi jelas memenuhi prinsip maslahah karena program tersebut secara nyata memberikan manfaat bagi peserta dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian politik mereka. Manfaat tersebut bukan bersifat sesaat, melainkan memiliki dimensi jangka panjang dalam membentuk generasi muda yang cakap berdemokrasi.

Lebih jauh, program ini juga memiliki nilai preventif terhadap potensi kemudaratan demokrasi, seperti berkembangnya apatisme politik di kalangan generasi muda, tingginya angka golput, dan mudahnya pemilih pemula terpengaruh oleh praktik politik uang atau informasi hoaks. Dengan membekali peserta kemampuan berpikir kritis dan literasi demokrasi sejak dini, program ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem demokrasi yang lebih sehat di Kabupaten Jember. Hal ini selaras dengan tujuan maslahah dalam fikih siyasah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[149] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* 147.

dusturiyah yang tidak hanya berorientasi pada manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis terhadap seluruh temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember merupakan sebuah program pendidikan politik yang tidak hanya efektif secara empiris, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang kuat, baik dari perspektif hukum positif maupun dari perspektif fikih siyasah dusturiyah. Program ini berhasil mendemonstrasikan bahwa pendidikan demokrasi yang dirancang dengan baik, disampaikan oleh narasumber yang kompeten, dan ditujukan kepada sasaran yang tepat, mampu menghasilkan perubahan nyata pada tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku politik pemilih pemula. Ke depan, keberlanjutan dan perluasan jangkauan program ini menjadi sebuah keniscayaan agar investasi demokrasi jangka panjang yang telah dirintis oleh KPU Kabupaten Jember dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi kualitas demokrasi di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi oleh KPU Kabupaten Jember

Pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember telah berjalan cukup baik sebagai bentuk pendidikan politik nonformal bagi pemilih pemula. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan edukatif seperti penyampaian materi kepemiluan, diskusi interaktif, sosialisasi demokrasi, serta pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan politik. Pelaksanaan program juga didukung oleh komunikasi yang cukup baik antara KPU dengan peserta, kesiapan sumber daya manusia, serta adanya komitmen penyelenggara dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Selain itu, program Sekolah Demokrasi telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kabupaten Jember. Pertama, keterbatasan narasumber yang berkompeten di bidang filsafat dan demokrasi menjadi hambatan dalam penyampaian materi secara mendalam, mengingat tidak tersedianya tenaga ahli dari jurusan filsafat di Kabupaten Jember. Kedua, keterbatasan anggaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akibat kebijakan efisiensi menyebabkan KPU tidak dapat memfasilitasi transportasi maupun uang saku peserta, sehingga berpotensi mengurangi jangkauan dan partisipasi peserta dari daerah yang lebih jauh. Ketiga, suasana pelaksanaan kegiatan dinilai kurang interaktif dan terlalu formal, sehingga sebagian peserta merasa kurang antusias dan cenderung tidak fokus selama kegiatan berlangsung. Keempat, cakupan peserta masih sangat terbatas, hanya menyasar pengurus OSIS dari sepuluh sekolah dan belum menjangkau pemilih pemula secara lebih luas dan merata. Kelima, frekuensi pelaksanaan program yang masih sangat jarang hanya satu hingga dua kali dalam setahun belum memadai untuk membangun kesadaran politik secara berkelanjutan di kalangan generasi muda Kabupaten Jember.

2. Efektivitas Program Sekolah Demokrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Jember

Program Sekolah Demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jember dapat dikatakan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai demokrasi, hak pilih, proses pemilu, serta pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan bernegara. Efektivitas program terlihat melalui aspek kognitif, yaitu meningkatnya pengetahuan peserta mengenai sistem demokrasi dan kepemiluan; aspek afektif, yaitu tumbuhnya kesadaran dan sikap positif terhadap pentingnya partisipasi politik; serta aspek kepedulian politik, yaitu meningkatnya keinginan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peserta untuk terlibat dalam kegiatan demokrasi secara bertanggung jawab. Selain itu, program Sekolah Demokrasi juga membantu peserta menjadi lebih kritis dalam memahami informasi politik yang berkembang di media sosial.

Namun demikian, efektivitas program ini masih belum optimal secara menyeluruh. Efektivitas yang dicapai baru dirasakan oleh kelompok peserta terpilih yang memiliki latar belakang aktif dalam organisasi, sehingga belum mencerminkan peningkatan kesadaran politik pemilih pemula secara umum. Penyampaian materi yang kurang variatif dan suasana kegiatan yang terlalu formal turut mengurangi daya serap peserta terhadap materi yang disampaikan. Berdasarkan teori efektivitas hukum dan teori implementasi kebijakan, keberhasilan program dipengaruhi oleh adanya dasar hukum yang jelas, komunikasi yang baik, kesiapan sumber daya, komitmen pelaksana, serta dukungan struktur organisasi KPU Kabupaten Jember. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek metode penyampaian, perluasan sasaran peserta, serta peningkatan frekuensi pelaksanaan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan agar efektivitas program dapat meningkat secara signifikan ke depannya.

3. Perspektif Fikih Siyasah terhadap Program Sekolah Demokrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Jember

Dalam perspektif fikih siyasah, program Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan amanah, keadilan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

musyawarah, dan kemaslahatan umat. Program ini dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab lembaga negara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan program Sekolah Demokrasi juga sesuai dengan prinsip musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam urusan publik. Selain itu, program ini sejalan dengan kaidah fikih siyasah "tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil maslahah" yang berarti bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Dengan demikian, program Sekolah Demokrasi tidak hanya memiliki nilai administratif dalam perspektif ketatanegaraan, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan dalam perspektif fikih siyasah karena bertujuan membentuk masyarakat yang sadar politik, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kualitas demokrasi.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan narasumber yang berkompeten di bidang filsafat dan demokrasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Jember perlu memperluas jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keahlian di bidang filsafat, hukum tata negara, dan demokrasi, agar kualitas penyampaian materi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

2. Berdasarkan temuan penelitian, suasana kegiatan yang terlalu formal dan kurang interaktif menyebabkan sebagian peserta kurang antusias selama program berlangsung. Hal ini perlu diperbaiki dengan mengembangkan metode penyampaian materi yang lebih variatif dan sesuai dengan karakter generasi muda, seperti simulasi pemilu, diskusi kelompok, permainan edukatif, maupun pemanfaatan media digital, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif.
3. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas program baru dirasakan oleh kelompok peserta terpilih yang aktif dalam organisasi, sehingga belum mencerminkan peningkatan kesadaran politik pemilih pemula secara menyeluruh. Oleh karena itu, cakupan peserta perlu diperluas tidak hanya kepada pengurus OSIS, tetapi juga menjangkau pemilih pemula dari berbagai latar belakang yang lebih beragam agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.
4. Temuan penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi yang masih sangat terbatas hanya satu hingga dua kali dalam setahun belum memadai untuk membangun kesadaran politik secara berkelanjutan. Sebagaimana diakui oleh penyelenggara sendiri, program ini perlu dilaksanakan lebih sering dan terprogram secara rutin agar dampaknya terhadap peningkatan kesadaran politik generasi muda dapat dirasakan secara lebih signifikan dan berkesinambungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi salah satu hambatan yang mengurangi kemampuan KPU dalam memfasilitasi peserta secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya advokasi anggaran yang lebih serius kepada pemerintah daerah maupun pusat agar program pendidikan pemilih mendapat alokasi yang memadai, mengingat program ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas demokrasi di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

B. Miles, M., & Huberman, A. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* California: Sage Publications.

Baqi, M. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

C. Edwards III, G. (1980). *Implementing Public Policy.* Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana.

Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana.

Harisudin, M. Noor. dkk. (2024). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.* Malang: Setara Press.

Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Kencana.

Kemenag. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyemprnaan 2019.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

Kendi, I. K. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua.* Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

P. Huntington, S., & M. Nelson, J. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries.* Cambridge: Harvard University Press.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Surakarta: Unisri Press.

Pulungan, J. (2014). *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dsn Pemikiran.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sholikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Grasindo.

Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural.* Jakarta: Gavin Kalam Utama.

Rahadi Budi Prayitno & Arlis Prayugo. (2023) *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik.* Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Jurnal

Ainurrizqi, & Sukmana. (2025). Partisipasi Politik Masyarakat di Negara Demokrasi. *Journal of Society Bridge, 3*(2). doi:https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.74

Alfarisyi. dkk. (2024). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Pendidikan Demokrasi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1*(1). doi:https://doi.org/10.572349/civilia.v1i1.329

Fatwa, A. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4*(4).

Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 10*(2). doi:https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278

Munandar. dkk. (2026). Pendidikan Politik Pemilih Pemula Melalui Politik Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 10*(2). doi:https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Novandika, & Riyanti. (2024). Pendidikan Politik dalam Meningkatan Partisipasi Generasi Muda. *Jurnal Themis, 2*(1). doi:https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.851

Sianturi, R. dkk. (2026). Peran Edukasi Politik Bawaslu dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(2).

Tabang, V. dkk. (2025). Pendidikan Demokrasi di Sekolah Sebagai Sarana Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Kelas XII di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8*(6). doi:https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8166

Warman, A. T. (2024). Peran Pendidikan Politik dan Demokrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula pada Pemilu di SMP Swasta Budi agung Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(3).

Wulandari. dkk. (2024). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. *Jurnal Comserva, 4*(4). doi:https://doi.org/10.59141/comserva.v4i4.1545

Skripsi

Tia Puji Astutik, ”Efektivitas Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Hayyumi Adi Putra, ” Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018.

Web Site

Komisi Pemilihan Umum, ”Daftar DPT Kabupaten Jember”, Diakses 15 Maret 2026, https://kab-jember.kpu.go.id/index.php/blog/read/daftar-pemilih-tetap-dpt-kpu-kabupaten-jember

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, ”Profil KPU Kabupaten Jember”, Diakses 8 Mei 2026, https://kab-jember.kpu.go.id/

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, ”Visi Misi KPU Kabupaten Jember”, Diakses 8 Mei 2026, https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/visi-misi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, ”Program Sosialisai Pendidikan Pemilih”, Diakses 8 Mei 2026, https://kab-jember.kpu.go.id/

Wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Andi Wasis selaku Komisioner divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih, Wawancara, 12 Mei 2026.

Andryzha Caprio selaku Staff SDM, Parmas, dan Sosdiklih, Wawancara 12 Mei 2026.

Jefri, Peserta Sekolah Demokrasi, Wawancara, 13 Mei 2026.

Affantino, Peserta Sekolah Demokrasi, Wawancara, 13 Mei 2026.

Mahsa, Peserta Sekolah Demokrasi, Wawancara, 18 Mei 2026.

Anindya, Peserta Sekolah Demokrasi, Wawancara, 18 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Kevin Nurayendra
NIM	: 224102030002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 Juni 2026

Saya yang menyatakan



Kevin Nurayendra

224102030002

SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1126/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2026 9 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Kevin Nurayendra
NIM	: 224102030002
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Efektivitas Sekolah Demokrasi Bagi Pemilih Pemula dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Politik (Studi di KPU Kabupaten Jember)

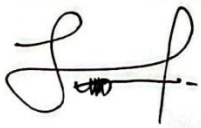
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Nama dan Jabatan Informan	TTD
1.	12-05-2026	Andi Wasis (Komisioner Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih)	
2.	12-05-2026	Andryzha Caprio (Staff SDM, Parmas, dan Sosdiklih)	
3.	12-05-2026	AT (Peserta Sekolah Demokrasi)	
4.	12-05-2026	JA (Peserta Sekolah Demokrasi)	
5.	12-05-2026	AN (Peserta Sekolah Demokrasi)	
6.	12-05-2026	MC (Peserta Sekolah Demokrasi)	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dengan Komisioner KPU Jember

1. Bagaimana pelaksanaan program Sekolah Demokrasi di KPU Kabupaten Jember?
2. Apa tujuan utama program Sekolah Demokrasi bagi pemilih pemula?
3. Apa saja materi yang diberikan kepada peserta Sekolah Demokrasi?
4. Apa indikator yang digunakan KPU untuk menilai keberhasilan program Sekolah Demokrasi dalam meningkatkan kesadaran politik?
5. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Sekolah Demokrasi?

Wawancara dengan Staff KPU Jember

1. Bagaimana pelaksanaan program Sekolah Demokrasi di KPU Kabupaten Jember?
2. Apa saja materi yang diberikan kepada peserta Sekolah Demokrasi?
3. Bagaimana antusias dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Sekolah Demokrasi?
5. Menurut Bapak, apakah program ini membantu meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula?
6. Apa upaya KPU agar program Sekolah Demokrasi dapat berjalan lebih baik kedepannya?

Wawancara dengan Peserta Sekolah Demokrasi

1. Apa yang Anda ketahui tentang program Sekolah Demokrasi yang diadakan oleh KPU?
2. Materi apa yang Anda peroleh selama mengikuti kegiatan tersebut?
3. Apakah program ini membuat Anda lebih memahami pentingnya pemilu?
4. Apakah setelah mengikuti program ini Anda lebih sadar pentingnya menggunakan hak pilih?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Apakah program ini membuat Anda lebih peduli terhadap isu politik atau demokrasi?
6. Menurut Anda, apa kelebihan atau kekurangan program Sekolah Demokrasi ini?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi Pelaksanaan Sekolah Demokrasi Di Kantor KPU Kabupaten Jember



Dokumentasi Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Ibu Siti Nur Indah Selaku Kasubag SDM, Parmas, dan Sosdiklih di Kantor KPU Kabupaten Jember



Dokumentasi Bersama Bapak Andi Wasis Selaku Komisioner Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih di Kantor KPU Kabupaten Jember



Dokumentasi Bersama Bapak Andryzha Caprio Selaku Staf Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih di Kantor KPU Kabupaten Jember



Dokumentasi Bersama Affantino dan Jefri Selaku Peserta Program Sekolah Demokrasi Di SMKN 2 Jember



Dokumentasi Bersama Mahsa dan Cahyaning Selaku Peserta Program Sekolah Demokrasi Di SMAN 2 Jember

SURAT SELESAI PENELITIAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jl. Kalimantan No. 31 Jember Kode Pos 68121
Telp. (0331) 333815, 337651 e-mail : kpujember@yahoo.com Fax. (0331) 337473

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 173/SDM.11-Kt/3509/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Agus Zainur Rahmat, S.E, M.Ak
NIP	:	198608022010121004
Jabatan	:	Sekretaris
Unit Kerja	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwasanya mahasiswa berikut :

Nama	:	Kevin Nurayendra
NIM	:	224102030002
Pendidikan	:	S1
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Fakultas Syariah
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar telah melakukan penelitian pada tanggal 12 Mei 2026 bertempat di KPU Kabupaten Jember dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Efektivitas Sekolah Demokrasi Bagi Pemilih Pemula dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Politik".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Mei 2026
Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT

Agus Zainur Rahmat, S.E., M.Ak.
NIP. 198608022010121004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BIODATA PENULIS



IDENTITAS PENULIS

Nama	: Kevin Nurayendra
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 23 Maret 2003
NIM	: 224102030002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK ABA 1 Ambulu	: 2008 - 2009
SDN Tegalsari 1	: 2009 - 2016
SMP Islam Ambulu	: 2016 - 2019
SMA Negeri Ambulu	: 2019 - 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R